



**bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENCANA KERJA TAHUN 2024

**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOGOR**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Tahun 2024. Renja BPKAD Tahun 2024 merupakan salah satu dasar/acuan perumusan program dan kegiatan Tahun 2024 yang akan dituangkan ke dalam Renja dan RKA Tahun 2024. Renja merupakan dokumen yang akan memberikan deskripsi mengenai sesuatu yang ingin dihasilkan di masa yang akan datang, target yang harus dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta merupakan landasan dalam menyusun prioritas kegiatan yang akan dibiayai dari sumber daya yang terbatas.

Renja disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan tersusunnya Renja 2024 BPKAD ini diharapkan target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2024-2026 BPKAD dapat dicapai sesuai harapan.

Cibinong, 2023

Kepala BPKAD Kabupaten Bogor,



TEUKU MULYA, S.T., M.T.

Pembina Tk. I

NIP. 197206161999031002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-12
1.3 Maksud dan Tujuan	I-20
1.4 Sistematika Penulisan	I-21
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKAD TAHUN 2022	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2022 dan Capaian Renstra BPKAD	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD	II-24
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD	II-35
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-48
2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat	II-72
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	III-3
3.3 Program dan Kegiatan	III-12
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1a	Rekapitulasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran BPKAD Tahun 2018 dan Pencapaian Renstra BPKAD s/d tahun 2020	II-4
Tabel 2.1b	Rekapitulasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran BPKAD Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra BPKAD s/d tahun 2022	II-5
Tabel 2.1c	Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran BPKAD Tahun 2022	II-6
Tabel 2.1d	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra BPKAD s/d tahun 2022	II-7
Tabel 2.2	Hasil Pencapaian Dukungan Terhadap Pancakarsa Tahun 2021 dan 2022	II-21
Tabel 2.3a	Capaian Indikator Kinerja Utama BPKAD tahun 2018 hingga tahun 2020	II-22
Tabel 2.3b	Capaian Indikator Kinerja Utama BPKAD tahun 2021 dan tahun 2022	II-23
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2024	II-49
Tabel 2.5	Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat	II-73
Tabel 3.1	Keterkaitan Renja 2024 BPKAD terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024	III-7
Tabel 3.1	Keterkaitan Renja 2024 BPKAD dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024	III-8
Tabel 3.2	Keterkaitan Renja 2024 BPKAD dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2024	III-9
Tabel 3.3	Dukungan Terhadap Arah Kebijakan Nasional	III-9
Tabel 3.4	Tujuan dan sasaran BPKAD tahun 2024	III-19
Tabel 3.5	Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor	III-17
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.	IV-5

LAMPIRAN XXVIII PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 35 TAHUN 2023

TANGGAL : 4 AGUSTUS 2023

TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2024

RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahun 2024 yang wajib disusun untuk menjabarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026. Sehubungan dengan tahun 2024 merupakan tahun penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bogor tanpa berpedoman pada visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah, maka Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disusun untuk mendukung tercapainya target prioritas pembangunan daerah tahun 2024.

Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 dilakukan secara simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor tahun 2024, yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat dan memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja dan pendanaan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta tercantum dalam SIPD-RI. Dengan demikian, kinerja yang ditargetkan diarahkan untuk merealisasikan target tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor yang mendukung target kinerja daerah, serta terakumulasi dalam pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.

Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, Rancangan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun secara simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Untuk itu, dalam proses penyusunan Renja perangkat daerah, seluruh perangkat daerah berkoordinasi, bersinergi dan berharmonisasi dengan Badan Perencana Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) serta pemangku kepentingan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. Dalam upaya mencapai keberhasilan Perangkat Daerah perlu adanya perencanaan yang baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Perangkat Daerah. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12 serta Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, hasil evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), bahwa Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Untuk itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 yang memuat program/kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari Penganggaran, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, serta Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi 14 siklus (Siklus Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Siklus Pengadaan, Siklus Penggunaan, Siklus Pemanfaatan, Siklus Pengamanan dan Pemeliharaan, Siklus Penilaian, Siklus Pemindahtanganan, Siklus Pemusnahan, Siklus Penghapusan, Siklus Penatausahaan, Siklus Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Siklus Pengelolaan BMD pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD, Siklus BMD

berupa Rumah Negara serta Siklus Ganti Rugi dan Sanksi) dengan meletakkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor sebagai acuan dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang transparan, akuntabel dan profesional.

a. Definisi Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor yang selanjutnya di singkat RENJA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12) serta Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026.

Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada BPKAD Kabupaten Bogor yang tercantum dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24).

Perubahan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 Ini disebabkan adanya perubahan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2).

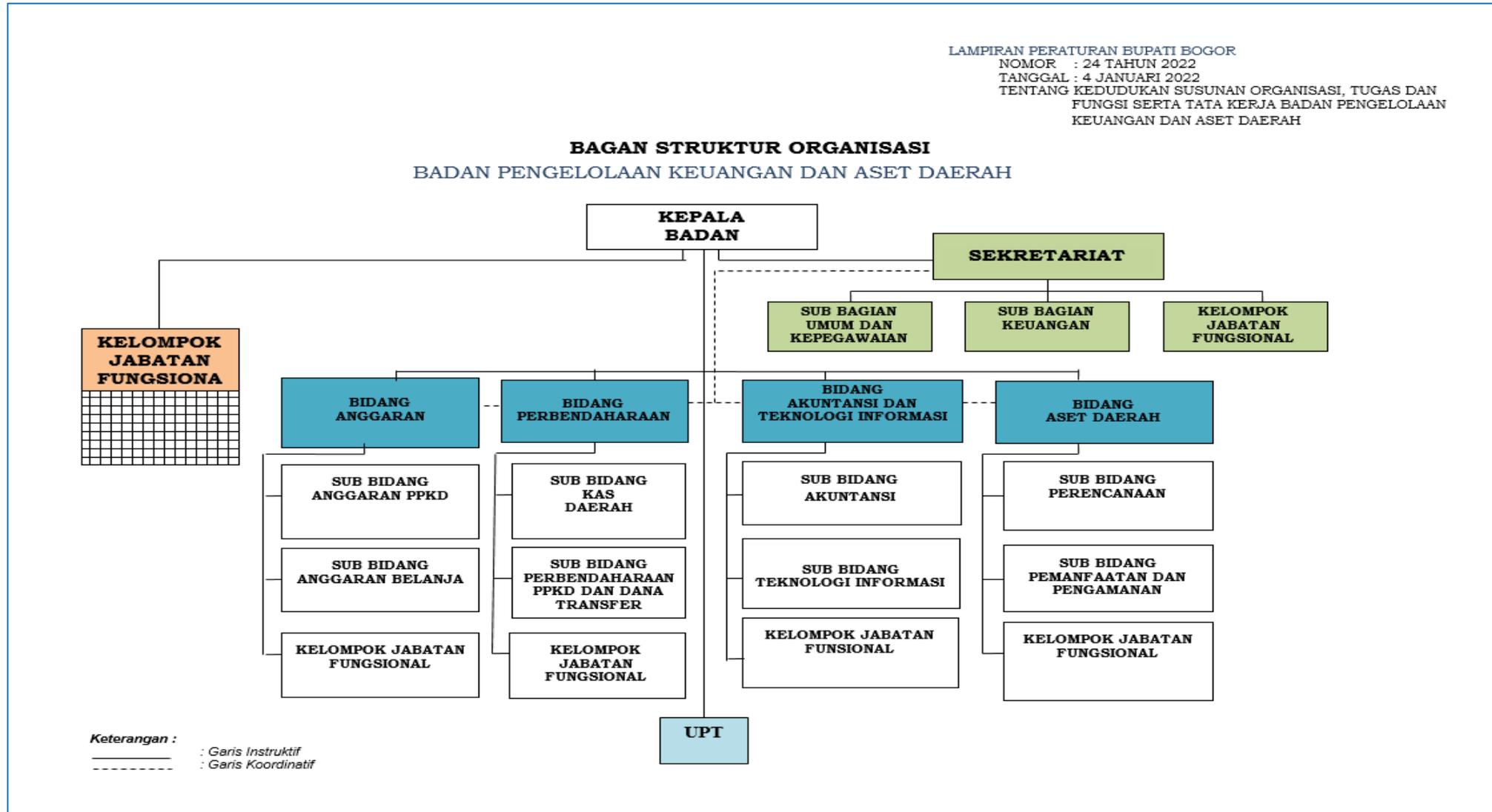
Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor *mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang keuangan.*

Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
5. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Berikut Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24) sebagai berikut :

Bagan 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor



b. Proses penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor

1. Mengakomodir program, kegiatan, sub kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024-2026 untuk Tahun 2024;
2. Mengoptimalkan dan menyusun peningkatan prioritas kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024 berdasarkan Rancangan Awal Renja dengan hasil usulan dalam Forum Perangkat Daerah (Rancangan Awal);
3. Mengompilasi dan menyusun pemeringkatan prioritas kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan hasil musrenbang RKPD di Kabupaten dengan hasil Forum Perangkat Daerah (Rancangan Akhir Renja);
4. Mempedomani Final RKPD.

c. Keterkaitan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor dengan Dokumen RKPD

Dokumen RKPD mempunyai keterkaitan dengan dokumen Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Renja BPKD). Dalam pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menyatakan bahwa Renja SKPD disusun dengan mengacu rancangan awal RKPD dan berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Di sisi lain dokumen RKPD

merupakan penjabaran tahunan dari Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sehingga dokumen RKPD harus sesuai dan konsisten dengan upaya pencapaian tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPD. Dokumen RKPD Kabupaten Bogor tahun 2024 merupakan penjabaran tahun pertama dari RPD Kabupaten Bogor tahun 2024-2026 dengan penekanan pada pencapaian tujuan, dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor yang disusun dengan menindaklanjuti hasil kesepakatan yang telah ditetapkan dalam Musrenbang tingkat desa dan tingkat Kecamatan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah harus berpedoman pada arah kebijakan nasional (RPJMN dan RKP) untuk keselarasan dan sinergi pembangunan pusat dan daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka dimungkinkan terdapat beberapa perubahan terkait kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah yang berdampak pada proses perencanaan dan penganggaran program pembangunan tahun 2024 di Kabupaten Bogor. Untuk itu RKPD Kabupaten Bogor tahun 2024 dirancang untuk dapat mengadopsi perubahan tersebut. Dengan kata lain dalam hal terdapat perubahan terhadap peraturan yang berdampak atas dokumen perencanaan lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan RKPD Tahun 2024 dalam proses penyusunannya maka dapat langsung disesuaikan tanpa harus merubah dokumen RKPD tahun 2024 terlebih dahulu. Berkaitan dengan penganggaran daerah maka dokumen RKPD tahun 2024 menjadi acuan bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Bogor tahun 2024.

d. **Keterkaitan antara Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor dengan Renstra BPKAD 2024-2025**

Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) 2024 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor dengan dokumen Renstra 2024-

2026 baik Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Tujuan Pemerintah Daerah sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yang terkait dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor adalah **Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik**, dengan **Indikator Tujuan RPD** yaitu *Indeks Reformasi Birokrasi*.

Adapun **Tujuan** Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor sesuai Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 adalah **Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel**, dengan **Indikator Tujuan BPKAD** yaitu **Tingkat Pemenuhan Kriteria Opini Laporan Keuangan yang Wajar**.

Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor tahun 2024-2026 yang terkait dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor adalah **“Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah”**.

Dengan **Indikator Sasaran** yaitu **Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**.

Adapun sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2024 oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

1. **Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas;**
2. **Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib.**

Pencapaian sasaran pertama *Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas* diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) atau indikator sebagai berikut :

- ✚ *Ketepatan Penetapan APBD.*
- ✚ *Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tinggi.*

Target indikator ini akan dicapai melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pencapaian Sasaran yang kedua yaitu *Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib*, Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) atau indikator yaitu :

✚ *Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tinggi.*

Oleh karena itu, Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor harus berkualitas dan mendukung pencapaian target indikator kinerja kunci lingkup urusan penunjang bidang urusan keuangan.

e. Keterkaitan antara Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor dengan Renja Kementerian/Lembaga, dan Renja Provinsi Jabar

Keterkaitan Renja 2024 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja Provinsi Jawa Barat dalam sinkronisasi kebijakan adalah sebagai berikut :

Terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang ingin diwujudkan Kementerian Keuangan, yaitu perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas serta hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan.

Dalam rangka mengukur pencapaian sasaran dimaksud, Kementerian Keuangan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu :

- a) Akurasi perencanaan APBN,
- b) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L, serta
- c) Indeks pemerataan keuangan antar daerah.

Sasaran Strategis 1: Perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas. Berbagai kebijakan telah diternpuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja negara. Kebijakan m1 diharapkan berdampak pada peningkatan efektivitas belanja pernerintah dalam pembangunan negara dengan mernpertirnbangkan aspek efisiensi dan ekonomis. Inisiasi kebijakan ini dilakukan dengan pengalihan belanja K/L yang bersifat konsumtif menjadi belanja produktif sebagai upaya untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomni. Selain itu, kebijakan pelaksanaan anggaran diarahkan untuk mewujudkan pola penyerapan anggaran yang proporsional sesuai perencanaan sepanjang tahun anggaran, percepatan dalarn realisasi belanja negara, dan pelaksanaan

anggaran yang lebih tepat waktu dan jumlah. Hal ini dilakukan melalui **pelaksanaan anggaran secara tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan taat pada peraturan perundang-undangan**. Sebagai sarana dalam mengukur capaian atas sasaran strategis perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas, Kementerian Keuangan menetapkan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu akurasi perencanaan APBN dan persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L.

Berdasarkan pada sasaran strategis Rencana Kerja (Renja) Kementerian Keuangan, yang berkaitan secara langsung dengan tupoksi BPKAD adalah Sasaran *Strategis ke satu* yaitu ” *Perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas*.

Dengan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD yaitu “Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, **pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat**, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.” dengan tujuan nomor dua yaitu “Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.

Sejalan dengan Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD dapat dijabarkan pada Tabel berikut :

Visi Kementerian Dalam Negeri	Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD
Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas 2. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib

Merujuk pada tujuan dan sasaran RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor adalah **tujuan ke 4 (empat)** yaitu *Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan Birokrasi yang didukung oleh Inovasi Daerah*, dengan **Sasaran** yaitu *Meningkatkannya kualitas dan kapasitas tata kelola Pemerintah Daerah*. yang dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran BPKAD sebagai berikut :

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Provinsi Jawa Barat dengan Tujuan dan Sasaran BPKAD Kabupaten Bogor

Tujuan RPD Jawa Barat	Sasaran Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Provinsi Jabar	Tujuan BPKAD	Indikator Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD
Tujuan ke 4, <i>Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan Birokrasi yang didukung oleh Inovasi Daerah.</i>	<i>Meningkatkannya kualitas dan kapasitas tata kelola Pemerintah Daerah</i>	Indeks Reformasi Birokrasi  bidang pengelolaan keuangan adalah opini WTP	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Tingkat Pemenuhan Kriteria Opini Laporan Keuangan yang Wajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas 2. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib

f. Tindak lanjut Renja Perangkat Daerah dalam penyusunan Rancangan APBD

Semua Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator kinerja serta pendanaan pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, akan di tuangkan kedalam Rancangan APBD 2024 yang selanjutnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 9 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
32. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia

- Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
35. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 36. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 461);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Startegis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Startegis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 679);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910) ;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 13
51. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
52. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi

- Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
53. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
 54. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 55. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
 56. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8);
 57. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95 Tahun 2016);
 58. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
 59. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 1);

60. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
62. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah dan Bagan Akun Standar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 44);
63. Peraturan Bupati Bogor Nomor 105 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 105);
64. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 28);
65. Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24);
66. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12);
67. Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 23).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dalam rangka penyusunan bahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024.

Sedangkan **Tujuan** disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Tahun 2024 adalah :

1. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam merumuskan target kinerja perangkat daerah yang mendukung pencapaian target kinerja daerah tahun 2024.
2. Memberikan informasi publik terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun 2024.
3. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam menyusun rincian belanja dalam tahapan KUA-PPAS, RKA dan RAPBD Tahun 2024

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BAB V : Penutup

BAB II

**HASIL EVALUASI RENJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2022**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Tahun 2024 memuat review hasil evaluasi pelaksanaan Renja dari tahun 2022. Dalam menyusun rencana program/kegiatan tahun 2024 memperhatikan realisasi capaian kinerja tahun 2022, pencapaian target Rencana Strategis BPKAD tahun 2018-2023.

Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor mulai tahun 2020 sampai sekarang, yang telah menimbulkan dampak yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor sangat besar terhadap berbagai sektor, terutama sektor sosial dan ekonomi. Hal ini membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat, khususnya dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Kebijakan *realokasi* anggaran terutama dibutuhkan untuk penanganan kesehatan dan penanganan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 tersebut. Dengan demikian, dibutuhkan penyesuaian terhadap target kinerja BPKAD yang telah ditetapkan.

❖ **Capaian Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**

Berdasarkan Renstra BPKAD Tahun 2018-2023, pada Tahun 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor menetapkan tujuan yaitu *Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah yang Akuntabel* dengan Indikator Tujuan yaitu *Pemenuhan Kriteria WTP* dengan target *4 Kriteria*, (1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, 2. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), 3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 4. efektifitas sistem pengendalian intern). Pada Tahun Anggaran 2022 target tercapai.

Ada 2 (dua) **Sasaran** Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu :

- ✚ Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas.
- ✚ Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib.

Indikator Sasaran strategis ada 3 (tiga) Indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan baik secara kuantitatif maupun kualitatif menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis, yaitu :

1. *Ketepatan Penetapan APBD dengan target Tepat Waktu*
2. *Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP dengan target kinerja 100,00%*
3. *Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan Barang Milik Daerahnya Baik dengan target kinerja 100,00.*

✓ Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas. Pencapaian sasaran ini diukur melalui **Indeks Kinerja Utama (IKU)** atau indikator yaitu :

- Ketepatan Penetapan APBD dengan target Tepat Waktu dengan target Tepat Waktu, atau 100%
- Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP dengan target kinerja 100,00%.

✓ Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib. Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) atau indikator yaitu :

- Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan Barang Milik Daerahnya Baik dengan target kinerja 100,00 %.

Adapun hasil pengukuran Capaian Kinerja untuk sasaran strategis yaitu *Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas* pada Tahun 2022 diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu :

1. Ketepatan Penetapan APBD dengan target Tepat Waktu, *realisasinya adalah Tepat Waktu atau 100%;*
2. Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP dengan target kinerja 100,00% *(72 Perangkat Daerah) realisasinya 100.00% (72 Perangkat Daerah).*

Sedangkan hasil pengukuran Capaian Kinerja untuk sasaran strategis yaitu *Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib* pada Tahun 2022 diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu :

1. Persentase Perangkat Daerah yang pengelolaan Barang Milik Daerahnya Baik dengan target kinerja 100,00% (72 Perangkat Daerah) *realisasinya 100.00% (72 Perangkat Daerah)*.

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dan Pencapaian Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor s/d Tahun 2022 dapat disajikan pada Tabel berikut :

Tabel. 2.1a Rekapitulasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2018 s.d Tahun 2020

Urusan : Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan : Keuangan
Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No.	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	2018	2019			2020		
				REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN								
	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat	WTP	WTP	WTP	100.00%	WTP	WTP	100.00%
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN								
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	1. Ketepatan Penetapan APBD	Tepat /Tidak Tepat	Tepat Waktu (100.00%)	Tepat Waktu (100.00%)	Tepat Waktu (100.00%)	100.00%	Tepat Waktu (100.00%)	Tepat Waktu (100.00%)	100.00%
		2. Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP	%	100	100	100	100.00%	100	100	100.00%
2.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	1. Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan Barang Milik Daerahnya Baik	%	100	100	100	100.00%	100	100	100.00%

Tabel. 2.1b Rekapitulasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022.

Urusan : Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan : Keuangan
Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No.	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	2021			2022		
				TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN							
	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Pemenuhan Kriteria WTP	Kriteria	4	4	100.00%	4	4	100.00%
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN							
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	1. Ketepatan Penetapan APBD	Tepat /Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu (100.00%)	Tepat Waktu (100.00%)	100.00%	Tepat Waktu (100.00%)	Tepat Waktu (100.00%)	100.00%
		2. Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP	%	100	100	100.00%	100	100	100.00%
2.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	1. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik	%	100	100	100.00%	100	100	100.00%

Tabel 2.1c Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dan Pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022

Urusan : Penunjang Urusan Pemerintahan
 Bidang Urusan : Keuangan
 Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

TUJUAN DAN SASARAN PEMERINTAH DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PEMERINTAH DAERAH	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	RUMUS	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI %
						VOLUME	VOLUME	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =8/7*100
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TUJUAN	INDIKATOR SASARAN					
Terwujudnya Masyarakat Bogor Maju dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Tingkat Pemenuhan Kriteria WTP	<i>Keterpenuhan Kriteria WTP</i> 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 2. Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosures) 3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan 4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern	Kriteria	4	4	100%
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN					
Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	1. Ketepatan Penetapan APBD	<i>Ketepatan penetapan APBD sesuai dengan ketentuan dan tidak melebihi tahun berjalan</i>	Waktu	Tepat	Tepat	100%
			2. Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai dengan SAP per Jumlah Perangkat Daerah dikali 100</i>	%	100	100	100%
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	1. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik per Jumlah Perangkat Daerah dikali 100</i>	%	100	100	100%

Tabel 2.1d Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dan Pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022

Urusan : Penunjang Urusan Pemerintahan
 Bidang Urusan : Keuangan
 Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
05	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
05 02	KEUANGAN					
05 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	8.00	4.42	55.25
		2. Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer <i>expenditures</i>)	%	67.77	68.32	100.81
		3. Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	13.77	9.51	69.06
		4. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-6.00	-6.00	100.00
05 02 02 2.01	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Dokumen Perencanaan Anggaran	Dokumen	4	4	100.00
	01 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Bogor yang disusun	Dokumen	2	2	100.00
	02 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Kabupaten Bogor yang disusun	Dokumen	2	2	100.00
	03 Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang diteliti dan diverifikasi	Dokumen	72	72	100.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Tahun 2022			
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	
	04	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang diteliti dan diverifikasi	Dokumen	72	72	100.00
	05	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang diteliti dan diverifikasi	Dokumen	72	72	100.00
	06	Sub Kegiatan Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang diteliti dan diverifikasi	Dokumen	72	72	100.00
	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Perda tentang APBD	Dokumen Perda	1	1	100.00
		Jumlah Rancangan Perbup tentang penjabaran APBD	Dokumen Perbup	2	2	100.00	
	08	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Perda tentang Perubahan APBD yang tersusun	Dokumen Perda	1	1	100.00
		Jumlah Rancangan Perbup tentang penjabaran Perubahan APBD yang tersusun	Dokumen Perbup	2	2	100.00	
	09	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Rancangan Peraturan dan Keputusan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang tersusun	Rancangan dan Keputusan Bupati	50	120	240.00
	10	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	1	1	100.00
	11	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	1	1	100.00
	12	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen	1	1	100.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
05 02 02 2.02	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penerbitan SP2D yang Diajukan oleh Perangkat Daerah	%	99.91	99.9	99.99
	01 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	1	1	100.00
	03 Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Surat penyediaan dana yang tersedia	SPD	700	475	67.86
	04 Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	1	1	100.00
	05 Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	12	12	100.00
	06 Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	7	7	100.00
	07 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	2	2	100.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Tahun 2022					
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %			
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100			
	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas yang tersedia	Dokumen	1	1	100.00		
	09	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Dokumen	1	1	100.00		
	10	Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang tersedia	Dokumen	1	1	100.00		
		Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	72	72	100.00		
05	02	02	2.04	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dana Transfer dan Bantuan Keuangan	%	100	100	100.00
		08		Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	1	1	100.00
		09		Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	1	100.00
		10		Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten	Laporan	1	1	100.00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Tahun 2022		
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %
1					2	3	4	5	6	7=6/5*100
05	02	02	2.03		Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan Daerah	Dokumen	1	1	100.00
				01	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	1	1	100.00
						Jumlah Jurnal validasi transaksi keuangan	Transaksi	70,000	117,483	167.83
				03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban APBD Bulanan, Triwulanan, Semesteran	Laporan	18	18	100.00
				04	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	Laporan	1	1	100.00
				05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten	Dokumen Raperda	1	1	100.00
							Dokumen Raperbup	1	1	100.00
				06	Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	1	100.00
				07	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	12	12	100.00
				09	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi	Raperbup	1	1	100.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
05 02 02 2.05	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Laporan Keuangan Daerah	Dokumen	1	1	100.00
	02 Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah dokumen hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1	1	100.00
	03 Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Orang	72	72	100.00
05 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset	Ya/Tidak	Ya	Ya	100.00
05 02 03 2.01	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang baik di Perangkat Daerah	%	100	100	100.00
	01 Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen Standar Harga Tertinggi Barang/Jasa	Dokumen Rancangan Perbup	2	2	100.00
	02 Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	4	4	100.00
	03 Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD / RKPBMMD)	Dokumen	4	4	100.00
	04 Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen Rancangan Perbup	1	1	100.00
	05 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Sub Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	100.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Tahun 2022			
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	
	06	Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	100.00
	07	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	100.00
	08	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	2	2	100.00
		Jumlah Dokumen SK Bupati tentang Penghapusan yang tersusun	Rancangan SK Penghapusan	20	29	145.00	
	09	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	4	4	100.00
	10	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	1500	1,498	99.87
	11	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan hasil Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik daerah	Laporan	2	2	100.00
	12	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan hasil Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	2	2	100.00
	13	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Orang	72	72	100.00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Tahun 2022		
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %
1					2	3	4	5	6	7=6/5*100
05	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100	100.00
05	02	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	27	27	100.00
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100.0
				02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100.00
				03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100.00
				04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100.00
				05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100.00
				06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Capkin	Laporan	7	7	100.00
				07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	17	17	100.00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Tahun 2022		
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %
1					2	3	4	5	6	$7=6/5*100$
05	02	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	30	30	100.00
				01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	97	97.00	100.00
				03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	100.00
				04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1	100.00
				05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi	Laporan	2	2	100.00
				06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100.00
				07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	24	24	100.00
				08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	2	100.00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Tahun 2022		
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %
1					2	3	4	5	6	7=6/5*100
05	02	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100.00
05	02	01	2.05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian dinas beserta atribut	paket	3	3	100.00
				09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang	40	-	-
05	02	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum	%	100	100	100.00
				01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1	100.00
				02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	2	2	100.00
				04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Paket	6	6	100.00
				05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Cetak dan Penggandaan Yang disediakan	Paket	2	2	100.0
				06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang Tersedia	Dokumen	1	1	100.00
				08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu yang terlayani	Laporan	12	12	100.00
				09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD :	Laporan	92	118	128.13
					- Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
					- Perjalanan Dinas Luar Daerah		Laporan	75	96	128.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Tahun 2022					
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %			
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100			
05	02	01	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelayanan Umum Perangkat daerah dilaksanakan dengan Baik	%	100	100	100.00
			02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Lapangan yang disediakan (roda 4 dan roda 2)	Unit	9	9	100.00
			10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedia	Unit	5	5	100.00
			11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Tersedia	Unit	5	5	100.00
05	02	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100.00
			01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan Jasa surat menyurat	Laporan	12	12	100.00
			02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	100.00
			04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	12	100.00

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Tahun 2022			
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %	
1				2	3	4	5	6	7=6/5*100	
05	02	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100.00	
				01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Kendaraan roda 4) :	Unit	11	11	100.00
05	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan yang dipelihara dibayarkan Pajak dan perizinan :	Unit	50	50	100.0
					- Kendaraan Roda 2		Unit	39	39	
					- Kendaraan Roda 4 lapangan		Unit	11	11	
				05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeulair Yang Terpelihara	Unit	2	2	100.00
				09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor, dan Bangunan lainnya yang di pelihara/ rehab	Unit	3	3	100.00
				10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	3	3	100.00
				11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	3	4	133.33

▪ **Hasil Pencapaian Dukungan Terhadap Pancakarsa Tahun 2022**

Dalam mendukung pencapaian program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2018-2023 yang dikenal dengan istilah Pancakarsa, yang terdiri 5 (lima) Karsa yaitu :

1. Karsa Sehat;
2. Karsa Cerdas;
3. Karsa Maju;
4. Karsa Membangun;
5. Karsa Berkeadaban.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor *mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang keuangan.*

Sesuai kewenangan BPKAD sebagai SKPKD, melaksanakan hal hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan rancangan anggaran PPKD;
2. Melaksanakan pengelolaan anggaran PPKD dan Dana Transfer.

Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah mendukung pencapaian ***Karsa Membangun*** dan ***Karsa Berkeadaban***.

- ✓ ***Karsa Membangun*** meliputi pemanfaatan infrastruktur jalan dengan prioritas betonisasi jalan desa. Dalam pengelolaan teknis dan administrasinya dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor.
- ✓ ***Karsa Berkeadaban*** meliputi Peningkatan bantuan operasional pesantren, masjid, musholla, ormas islam dan majelis ta'lim dan mengoptimalkan islamic center, peningkatan insentif bagi para pelaku pembangunan Rt/Rw, Amil, Linmas, Kader posyandu, marbot dan guru ngaji dan peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama. Dalam pengelolaan teknis dan administrasinya dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor.

Hasil Pencapaian dukungan terhadap Pancakrsa pada Tahun 2022 pencapaian **Karsa Membangun** melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan yang meliputi pemanfaatan infrastruktur jalan dengan prioritas betonisasi jalan desa terealisasi sebanyak 412 desa dari target 415 desa atau sebesar 99,28 hal ini dikarenakan adanya 3 Desa yang tidak mencairkan baik di Tahap I dan Tahap II yaitu Desa Raga Jaya di kecamatan Bojonggede, Desa Cidokom di Kecamatan Rumpin dan Desa Pasirlaja di Kecamatan Sukaraja.

Sedangkan pencapaian **Karsa Berkeadaban** melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan yang meliputi : Peningkatan bantuan operasional pesantren, masjid, musholla, ormas islam dan majelis ta'lim dan mengoptimalkan islamic center, peningkatan insentif bagi para pelaku pembangunan Rt/Rw, Amil, Linmas, Kader posyandu, marbot dan guru ngaji dan peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama realisasinya 100%..

Hasil pencapaian dukungan terhadap Pancakarsa Tahun 2021 dan 2022 dapat dijabarkan pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel. 2.2. Hasil Pencapaian Dukungan Terhadap Pancakarsa Tahun 2021 dan 2022

NO	KARSA BOGOR	PD PENGAMPU	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUB-SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
								TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	MEMBANGUN												
1	Meliputi pemanfaatan infrastruktur jalan dengan prioritas betonisasi jalan desa	BPKAD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus - satu miliar satu desa (Samisade)	Desa	416	414	99.51	415	412	99.28
	BERKEADABAN												
12	Peningkatan bantuan operasional pesantren, masjid, musholla, ormas islam dan majelis ta'lim dan mengoptimalkan islamic center, peningkatan insentif bagi para pelaku pembangunan Rt/Rw, Amil, Linmas, Kader posyandu, marbot dan guru ngaji dan peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama	BPKAD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Penyaluran Bantuan Keuangan umum - Alokasi Dana Desa (ADD):							
						1. Insentif RT / RW	Orang	19,075	19,075	100	19,194	19,194	100
						2. Insentif Anggota Linmas	Orang	4,160	4,160	100	4,160	4,160	100
						3. Insentif guru ngaji	Orang	10,400	10,400	100	10,400	10,400	100
						4. Operasional Posyandu	Lembaga	4,770	4,770	100	4,830	4,830	100

Tabel. 2.3.a. Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2020

Urusan : Penunjang Urusan Pemerintahan
 Bidang Urusan : Keuangan
 Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No.	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	2018	2019			2020		
				REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN								
	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat	WTP	WTP	WTP	100.00%	WTP	WTP	100.00%
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN								
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	1. Ketepatan Penetapan APBD	Tepat /Tidak Tepat	Tepat Waktu (100.00%)	Tepat Waktu (100.00%)	Tepat Waktu (100.00%)	100.00%	Tepat Waktu (100.00%)	Tepat Waktu (100.00%)	100.00%
		2. Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP	%	100	100	100	100.00%	100	100	100.00%
2.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	1. Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan Barang Milik Daerahnya Baik	%	100	100	100	100.00%	100	100	100.00%

Tabel. 2.3b Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 dan 2022

Urusan : Penunjang Urusan Pemerintahan
 Bidang Urusan : Keuangan
 Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No.	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	2021			2022		
				TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN							
	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Pemenuhan Kriteria WTP	Kriteria	4	4	100.00%	4	4	100.00%
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN							
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	1. Ketepatan Penetapan APBD	Tepat /Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu (100.00%)	Tepat Waktu (100.00%)	100.00%	Tepat Waktu (100.00%)	Tepat Waktu (100.00%)	100.00%
		2. Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP	%	100	100	100.00%	100	100	100.00%
2.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	1. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik	%	100	100	100.00%	100	100	100.00%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Renstra 2018-2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor, pada Tahun 2022 BPKAD Kabupaten Bogor menetapkan tujuan yaitu *Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel* dengan Indikator Tujuan yaitu Pemenuhan kriteria WTP. Dan juga telah menetapkan Sasaran Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan baik secara kuantitatif maupun kualitatif menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis BPKAD yaitu :

- 1) Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas. Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Ketepatan Penetapan APBD dengan target kinerja 100 % (Tepat Waktu);
 - b. Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP dengan target kinerja 100 % (72 Perangkat Daerah);
- 2) Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib di Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) dengan indikator sebagai berikut :
 - ✚ Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan Barang Milik Daerahnya Baik dengan target kinerja 100 % (72 Perangkat Daerah).

❖ Pengukuran Kinerja

Pencapaian secara keseluruhan pada Tahun 2022 menunjukkan bahwa Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dapat diuraikan pada Tabel berikut :

Pengukuran Indikator Kinerja Utama BPKAD Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Ketepatan Penetapan APBD	100 %	100 %
		Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP	100 %	100 %
2.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib di Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik	100 %	100 %

----- Rata-rata Capain Indikator Kinerja 100%

Pengukuran Indikator Kinerja Penunjang BPKAD Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %
1.	Terwujudnya Tata Kelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Baik, Bersih, dan Efektif	Nilai Akip	BB	BB

----- Rata-rata Capain Indikator Kinerja 100%

2.2.1. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan **“berhasil”** yaitu capaian rata-ratanya 100,00% dari target.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikator kinerja capaian tahun 2022 terhadap capaian Akhir Renstra 2023 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas

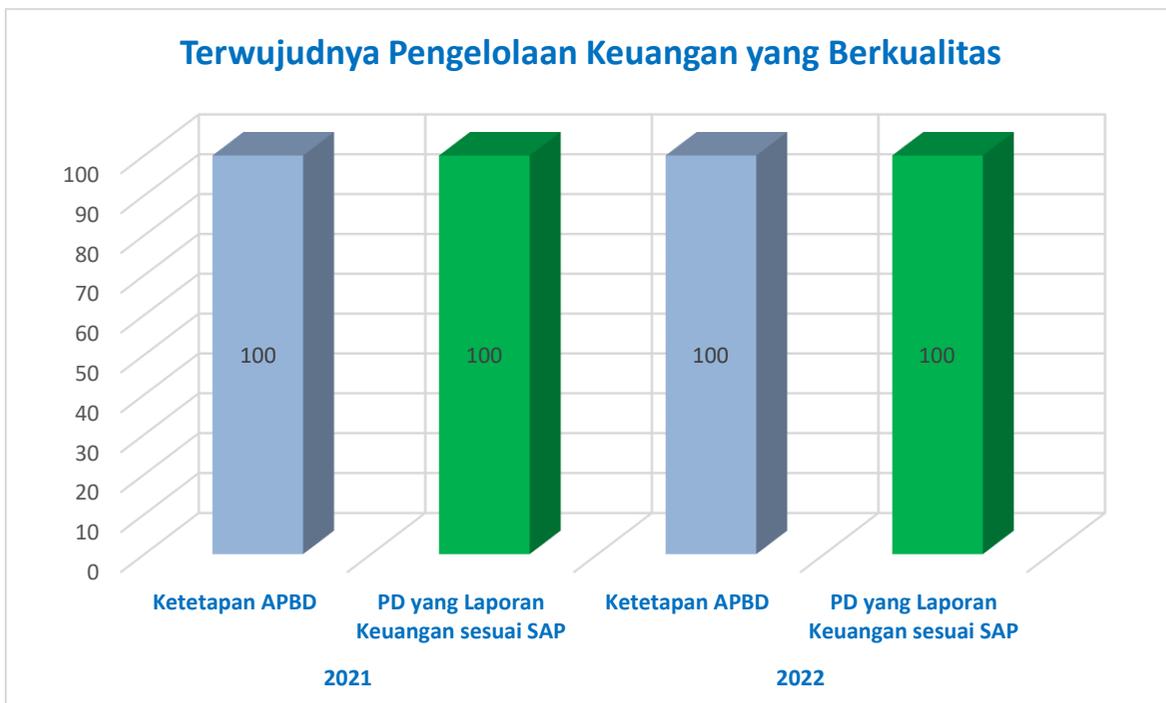
Akuntabilitas keuangan pemerintah memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. **Pertanggungjawaban** yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntabilitas pemerintah juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses **manajerial**, seperti perencanaan, penganggaran, pengawasan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah. akuntabilitas pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat **pengawas** fungsional secara efektif dan efisien. Terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah akan menjadi landasan awal bagi tatakelola pemerintahan yang lebih baik dan segala pertanggung jawaban keuangan yang berasal dari dana masyarakat akan berjalan lancar, Hal ini tak lepas dari **berkualitasnya** Laporan keuangan yang di sajikan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah terus meningkat

Tabel **Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas Capaian Tahun 2022 terhadap Capaian Renstra Akhir Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022			Capaian 2022 terhadap Tahun 2023
				Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	Ketepatan Penetapan APBD	% Tepat Waktu	% Tepat Waktu	% Tepat Waktu	% Tepat Waktu	100 %	100 %
		Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya Sesuai SAP	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Rata-Rata Capaian			100 %	100 %	100 %	

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja untuk *Sasaran Strategis Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas di Perangkat Daerah* Tahun 2022 diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Ketepatan Penetapan APBD dimana dalam penetapan APBD Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2022 realisasinya 100.00% (Tepat Waktu) dari target 100.00% Tepat Waktu ;
2. Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP dengan target kinerja 100,00% (72 Perangkat Daerah) realisasinya 100.00%;



❖ **Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pertama yaitu Ketepatan Penetapan APBD**

Capaian IKU yang pertama yaitu Ketepatan Penetapan APBD dihasilkan pada Ketepatan Penetapan APBD dengan mempedomani Permendagri Nomor 13 tahun 2016 pasal 116 ayat 2 tentang Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) menetapkan Perda APBD Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 31 Desember 2021, jadi tercapai realisasi atau 100,00%.

Keberhasilan Sasaran dengan Indikator Ketepatan Penetapan APBD didukung melalui pelaksanaan 1 (satu) Program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

❖ **Program Pengelolaan Keuangan Daerah** terdiri dari 5 Kegiatan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 1.558.480.005.814,00 atau 97.29% dari target Rp 1.601.878.730.492,00 sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 43.398.724.678,00 atau 02,71%. Efisiensi tersebut berasal dari; Efisiensi dari Belanja sewa gedung, pembayaran jasa tenaga ahli/narasumber, jasa tenaga kerja, adanya selisih penawaran pengadaan ATK, cetak, pencairan disesuaikan dengan kebutuhan yaitu pengadaan makanan dan minuman kegiatan, penggandaan, perjalanan dinas biasa/ dalam kota.

Capaian Indikator Program Pengelolaan Keuangan Daerah dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel [Capaian Indikator Program Pengelolaan Keuangan Daerah](#)

No	Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022
1.	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	8,00	4,00
2.	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	67,77	68,32
3.	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	13,77	9,51
4.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-6	-6,00

✚ **Permasalahan dan Hambatan :**

1. Adanya perubahan regulasi dari Pemerintah pusat yang dinamis sehingga cukup berpengaruh pada kebijakan Pemerintah Daerah.
2. Kepatuhan Anggaran Perangkat Daerah, terhadap penyusunan anggaran sesuai perencanaan, tepat waktu, efisiensi dan efektif.

3. Masih adanya dampak pandemi covid yang terjadi sejak tahun 2020 memberi pengaruh pada Anggaran Belanja, sehingga penentuan prioritas perencanaan anggaran lebih prioritas pada belanja urusan kesehatan dan pemulihan ekonomi daerah.

✓ **Solusi/Strategi Pemecahan Masalah**

1. Dilakukan sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah secara sinergi berkelanjutan.
2. Melakukan Pembinaan dan pendampingan bagi Perangkat Daerah dalam Penatausahaan Keuangan.



3. Meningkatkan koordinasi dengan Kemendagri dan Perangkat Daerah dalam optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
4. Meningkatkan Koordinasi dan melaksanakan rekonsiliasi data dengan SKPD dalam penyusunan Laporan keuangan pemerintah daerah.

- **Capaian Indikator Kinerja Utama yang kedua yaitu Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP** di hasilkan dari pengukuran Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP Nomor 71 Tahun 2010 (Standar Akuntansi Pemerintahan). Sesuai dengan hasil Review Bidang Akuntansi terhadap Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, menyimpulkan bahwa Laporan Keuangan 72 SKPD dalam Pemerintah Kabupaten Bogor sudah Sesuai dengan SAP, realisasinya **tercapai** atau 100 %.

Keberhasilan Sasaran dengan Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Keuangan Daerah;

Permasalahan dan Hambatan :

- Masih adanya beberapa Perangkat Daerah yang mengirim laporan belum lengkap dan tepat waktu.
- Pembinaan Pola Pengelolaan Penerimaan Pendapatan masih perlu ditingkatkan.
 - Dinamika kebijakan pemerintah pusat yang cepat dan harus direspon di dalam kebijakan pelaporan dan pembangunan di daerah.

✓ **Solusi/Strategi Pemecahan Masalah**

1. Meningkatkan pemahaman SDM terkait peraturan perundang-undangan tentang kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah.
2. Meningkatkan kemampuan SDM pejabat



Bpkad.kabbogor



www.bpkad.bogorkab.go.id

penatausahaan dalam Implementasi pengelolaan keuangan daerah dan Barang milik daerah.

3. Pendampingan dan Pembinaan secara berkesinambungan bagi Pejabat pengelolaan penatausahaan keuangan perangkat daerah, Bendahara, dan Petugas akuntansi.

4. Kerjasama dengan Inspektorat dan Instansi Vertikal untuk melakukan pendampingan terkait akuntansi dan pelaporan.

Sasaran 2 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib

Pengelolaan asset atau barang milik daerah sebagaimana pengelolaan keuangan daerah juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabilitas yang sesuai dengan prinsip *good governance*.

Fungsi dari pengelolaan barang milik daerah adalah untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat agar lebih optimal melalui:

- a. Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, baik menyangkut inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah;
- b. Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah;
- c. Pengamanan aset daerah dan;
- d. Tersedianya data atau informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.

Dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2016 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan barang daerah adalah Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu seluruh tahapan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Untuk melakukan pengelolaan aset yang baik, pemerintah pusat maupun daerah telah menyusun kebijakan pengelolaan aset pada setiap tahapannya sesuai dengan Permendagri Nomor 19 tahun 2016, Tugas Poko dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka BPKAD mendorong Perangkat Daerah dapat mematuhi kebijakan

pengelolaan aset daerah sehingga pengelolaan barang milik daerah menjadi tertib. Hasil pengukuran capaian kinerja dari Sasaran Terwujudnya Pengelolaan Barang Miik Daerah yang Tertib dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib Capaian Tahun 2022 terhadap Capaian Renstra Akhir Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022			Capaian 2022 terhadap Tahun 2023
				Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)	
'2'	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Barang Milik Daerahnya Baik	% Perangkat Daerah	100 % 72	100 % 72	100 % 72	100 %	100 %
		Rata-Rata Capaian				100 %	100 %	100 %

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja untuk *Sasaran Strategis Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib di Perangkat Daerah* Tahun 2022 diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik, realisasinya 100 % dari target 100 %.



- **Capaian Indikator Kinerja Utama yang ketiga yaitu Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Pengelolaan Barang Milik Daerahnya Baik** dihasilkan dari Perangkat Daerah yang Pengelolaan Barang Milik Daerahnya Baik sesuai dengan hasil Monitoring terhadap Laporan KIB (Kartu Inventaris Barang) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari 72 SKPD, pengelolaan Barang Milik Daerahnya telah dinilai Baik, berhasil **tercapai** realisasinya atau 100%.

Keberhasilan Sasaran dengan Indikator Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik didukung melalui 1 (satu) Program yaitu Program Pengelolaan Barang Milik Daerah realisasinya 100 % dari target 100 %.

Capaian Indikator Program dapat disajikan pada Tabel berikut :

Tabel Capaian Indikator Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

No	Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian (%)
1.	Managemen Aset	Ya	Ya	100 %
	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Ya	Ya	100 %
	2. Apakah ada untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Ya	Ya	100 %
	3. Apakah ada proses asset tahunan? (Ya/Tidak)	Ya	Ya	100 %
	4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan Anggaran? (Ya/Tidak)	Ya	Ya	100 %

Permasalahan dan Hambatan :

- Masih belum pulihnya kondisi dan pembangunan paska pandemi Covid-19 samapi dengan tahun 2022.
- Barang Aset Milik Daerah berupa aset Tanah yang merupakan Barang Aset yang pengadaan/ penyerahannya sudah Lama, masih belum didukung dengan kelengkapan dokumen-dokumen alas hak.

✓ **Solusi/Strategi Pemecahan Masalah**

1. Meningkatkan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diharapkan pejabat pengguna barang pada Perangkat Daerah agar mengetahui dan memahami penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengguna barang PD dalam mengelola Barang Milik Daerah.



3. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis, untuk mendapatkan kepastian alas hak untuk tanah yang merupakan Aset Pemerintah Daerah.

A. Realisasi Anggaran

Dari pengukuran capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor telah mencapai nilai Target yang ditentukan. Evaluasi telah dilakukan setelah penetapan indikator dan penetapan capaian kinerja.

Anggaran Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 yang telah ditetapkan sebesar Rp1.640.780.958.210,00 dan telah terserap sebesar Rp 1.597.872.233.276,00 atau sebesar 97,38% dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp 47.372.096.338,00 terealisasi sebesar Rp 42.706.274.778,00 atau sebesar 90,15% sehingga

terdapat efisiensi sebesar Rp 4.665.821.560,00 atau sebesar 9,85%, yang berasal dari efisiensi gaji dan tunjangan serta dari tambahan penghasilan.

2. Belanja Modal realisasinya sebesar Rp 1.261.446.000,00 dari anggaran sebesar Rp 1.550.402.966,00 atau terserap sebesar 81,36%, dengan sisa anggaran sebesar Rp 288.956.966,00 atau sebesar 18,64%;
3. Belanja Tidak Terduga realisasinya sebesar Rp 30.229.239.161,00 dari anggaran sebesar Rp 59.532.570.574,00 atau terserap sebesar 50,78%, dengan sisa anggaran sebesar Rp 29.303.331.413,00 atau sebesar 49,22%;
4. Belanja Transfer realisasinya sebesar Rp 1.523.675.273.337,00 dari anggaran sebesar Rp 1.532.325.888.332,00 atau terserap sebesar 99,44%, dengan sisa anggaran sebesar Rp Rp 8.650.614.995,00 atau sebesar 0,56%.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.

Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24), yaitu memiliki fungsi pengkoordinasian dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sasaran yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif. BPKAD mempedomani upaya pencapaian sasaran tersebut, dengan melakukan penyusunan perencanaan lima tahunan (Renstra) dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra BPKAD. Selain itu upaya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BPKAD telah menampilkan dokumen-dokumen terkait pengelolaan keuangan pada website resmi pemerintah Kabupaten Bogor sebagai bentuk transparansi

pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang daerah kepada masyarakat. Sebagai bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, maka penetapan Peraturan Daerah tentang APBD senantiasa diupayakan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/ masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi sesuai dengan Renstra K/L Renstra dan Provinsi Jawa Barat. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi BPKAD Kabupaten Bogor pada Tahun 2024-2026, tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

Berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, terdapat 4 (empat) **isu strategis** yang dapat diidentifikasi untuk tahun 2024, yaitu:

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
3. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur Dasar
4. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah

Berdasarkan pada Isu strategis Provinsi Jawa Barat tersebut, yang berkaitan secara langsung dengan tupoksi BPKAD adalah Isu Strategis ke 4 (empat) yaitu "Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor tahun 2024-2026 ada 4 (empat) **isu strategis** yaitu :

1. Pelayanan Publik;
2. Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Daya Saing Daerah;
4. Pembangunan Berkelanjutan.

Dari empat isu strategis pembangunan diatas, yang berkaitan dengan tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor adalah isu strategis ke 2 (dua), yaitu *Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.

Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Dalam rangka mendukung terciptanya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, maka diperlukan peningkatan kompetensi dan kualitas Aparatur Sipil Negara, peningkatan aksesibilitas masyarakat dalam informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, dan peningkatan integrasi antar sektor.

Dari isu strategis *Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* di jabarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor menjadi 3 (tiga) isu strategis yaitu :

1. *Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah;*
2. *Peningkatan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah;*
3. *Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.*

Isu Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Isu Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026

URUSAN / UNSUR	:	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
BIDANG URUSAN / UNSUR	:	KEUANGAN	
PERANGKAT DAERAH	:	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

NO	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1.	<i>Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan proses penyusunan APBD yang aspiratif, transparan dan akuntabel yang berorientasi kepada anggaran kinerja Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan perencanaan pengelolaan keuangan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat kelembagaan dan tatakelola keuangan pemerintah daerah berbasis e-government yang terintegrasi dengan baik, meliputi proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
2.	<i>Peningkatan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah</i>	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian, Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima Meningkatkan pelayanan dan fasilitasi bagi Perangkat Daerah/Biro, Kecamatan/Desa dan Pihak Ketiga serta Stakeholder di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor Meningkatkan pembinaan penatusahaan keuangan pemerintah daerah Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis IT yang Efisien dan Efektif Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD 	<ul style="list-style-type: none"> Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan membangun serta meningkatkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi dengan stakeholders guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan
3.	<i>Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian, Pengelolaan dan Informasi Aset Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima Menyusun perencanaan pengadaan dan pemanfaatan aset Pengaturan Pengelolaan aset yang efisien, efektif dan akuntabel Meningkatkan Sistem Pengelolaan aset Daerah Berbasis IT yang Efisien dan Efektif Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan perencanaan pengelolaan aset daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan membangun serta meningkatkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi dengan stakeholders guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan barang milik daerah Mengoptimalkan pemanfaatan aset agar mampu mendukung pelayanan dan dapat memberikan masukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor

Secara umum dalam pelaksanaan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bogor masih belum optimal yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, masih kurangnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik, pelayanan data perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penataan system manajemen SDM aparatur, penataan peraturan perundang-undangan, adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan dan peningkatan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota. Meningkatnya Potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan (AHTG) terhadap stabilitas politik dan keamanan, pemahaman idiologi serta kerukunan beragama.

Selain itu juga BPKAD sebagai Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor berperan besar untuk menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi perencanaan kebutuhan, pengadaan dan distribusi, pemanfaatan dan pengamanan barang daerah serta penatausahaan barang daerah. Implikasinya, BPKAD harus mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan, pengadaan dan distribusi, pengamanan dan pemanfaatan serta penatausahaan barang daerah yang digunakan masing-masing SKPD untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Bogor yang mandiri, dinamis dan sejahtera.

Isu dan permasalahan diatas memerlukan penanganan secara komprehensif yang mencakup arah strategi organisasi, rencana program kerja dan rencana sumber pendanaan program. Beberapa langkah yang harus dilaksanakan oleh BPKAD untuk mengakomodir isu dan permasalahan diatas dalam melaksanakan pelayanan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Bogor, sebagai berikut :

1. Membangun dan meningkatkan komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas;
2. Memperkuat kelembagaan dan tatakelola keuangan pemerintah

daerah berbasis e-government yang terintegrasi dengan baik, meliputi proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset milik daerah;

3. Menerapkan kebijakan pola kerja, yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakan nasional yang strategis dengan memperhatikan kepentingan daerah;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan aset agar mampu mendukung pelayanan dan dapat memberikan masukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor;
5. Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan membangun serta meningkatkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi dengan stakeholders guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah

Tabel

Pemetaan Analisa SWOT BPKAD

INTERNAL	EKSTERNAL
(+) Kekuatan	(+) Peluang
1. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai	1. Banyaknya penyedia jasa yang bergerak dalam bidang teknologi informasi khususnya sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan barang daerah yang dapat menyederhanakan pengolahan data
2. Adanya produk hukum daerah sebagai landasan hukum pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang daerah	
3. Dukungan anggaran yang memadai dari pimpinan daerah dan legislatif	2. Harmonisnya hubungan eksekutif dan legislatif serta antara anggota Muspida di Kabupaten Bogor
4. Tersedianya aplikasi pengelolaan keuangan sebagai alat bantu pengelolaan keuangan daerah dan terintegrasi antar SKPD dengan BPKAD selaku SKPKD	3. Dekatnya Ibukota Kabupaten Bogor dengan Ibukota Negara dan Ibukota Provinsi yang memudahkan koordinasi dan komunikasi perihal pengelolaan keuangan dan barang daerah

INTERNAL	EKSTERNAL
5. Tersedianya aplikasi pengelolaan barang daerah sebagai alat bantu pengelolaan barang daerah yang terintegrasi antara SKPD dengan BPKAD (selaku Pejabat Penatausahaan Barang Daerah)	
(-) Kelemahan	(-) Ancaman
1. Terbatasnya Kualitas SDM pengelola keuangan dan barang daerah yang menguasai Akuntansi	1. Dinamisnya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan barang daerah
2. Belum terpenuhinya jumlah pegawai sesuai dengan beban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	2. Adanya perbedaan persepsi atau interpretasi kebijakan pengelolaan keuangan dan barang daerah antara pengawas dan pemeriksa dengan pengelola
3. Belum terintegrasinya aplikasi sistem pengelolaan keuangan dan barang daerah secara optimal	3. Jaringan teknologi informasi, sarana dan prasarana yang tidak merata antar Perangkat Daerah /Kecamatan
	4. Mutasi pegawai sering terjadi
	5. Kurang optimalnya pengetahuan tentang keuangan pemerintahan dan terbatasnya SDM yang dimiliki Perangkat Daerah

Berdasarkan tabel pemetaan tersebut, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan prioritas.

Strategi S-O

Strategi S-O merupakan strategi penggunaan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi S-O yang diterapkan yaitu penyempurnaan sistem informasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah secara online dan terintegrasi dengan seluruh PD.

Strategi W-O

Strategi W-O merupakan strategi mengatasi kelemahan internal untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi W-O yang diterapkan yaitu peningkatan kapabilitas pegawai.

Strategi S-T

Strategi S-T merupakan strategi penggunaan kekuatan internal untuk dapat mengatasi ancaman yang ada. Strategi S-T yang diterapkan yaitu peningkatan pemahaman aparatur mengenai pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Strategi W-T

Strategi W-T merupakan strategi mengatasi kelemahan internal untuk dapat menanggulangi ancaman yang ada. Strategi W-T yang diterapkan yaitu penyesuaian peraturan perundang-undangan yang ada di daerah seiring dengan adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Dari Tabel Analisis SWOT, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yaitu :

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia dari berbagai disiplin ilmu, namun jumlahnya pada BPKAD secara kuantitas masih kurang dan kualitas pegawai belum memadai secara merata;
2. Lokasi Kabupaten Bogor yang strategis yaitu dekat dengan Pusat Pemerintahan maupun Pemerintah Propinsi namun perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah sangat dinamis;
3. Tersedianya aplikasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagai alat bantu pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dan terintegrasi antar Perangkat Daerah dengan BPKAD selaku SKPKD ataupun Pengelola BMD, namun kedua aplikasi tersebut belum terintegrasi dalam penginputan data dan pelaporannya, sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal;
4. Banyaknya penyedia jasa yang bergerak dalam bidang teknologi informasi khususnya sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dapat menyederhanakan pengolahan data namun kemampuan SDM yang tidak merata di Perangkat Daerah/Kecamatan dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta adanya mutasi/rotasi/promosi SDM pengelola keuangan dan BMD;
5. Adanya aplikasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagai alat bantu pengelolaan keuangan dan barang milik daerah

dan terintegrasi antar Perangkat Daerah dengan BPKAD selaku SKPKD ataupun Pengelola BMD namun kemampuan SDM yang tidak merata di Perangkat Daerah/Kecamatan dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta adanya mutasi/rotasi/ promosi SDM pengelola keuangan dan BMD sehingga pengelolaan keuangan dan BMD belum optimal;

6. Pengetahuan dan Kemampuan SDM yang tidak merata pada Perangkat Daerah/Kecamatan dalam Pengelolaan Keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah.

2.3.1. BASIS DATA

2.3.1.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya, sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi keuangan yang memadai. Laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan sarana untuk mempertanggung jawabkan kinerja keuangannya kepada publik. BPKAD harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami

Karakteristik kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan syarat normatif yang diperlukan agar memenuhi kualitas yang dikehendaki. LKPD setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian artinya LKPD tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan yaitu: opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak

Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Penyusunan laporan keuangan merupakan bentuk transparansi pemerintah atas pengelolaan keuangan daerah. Transparansi informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menjadi pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah.

Banyak pihak yang memanfaatkan informasi dari laporan keuangan. Salah satunya adalah sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah agar tepat sasaran. BPKAD merupakan entitas publik yang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam bentuk laporan keuangan daerah. BPKAD berwenang untuk melaksanakan penatausahaan keuangan secara tertib, efisien, efektif, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Memperkuat kelembagaan dan tatakelola keuangan pemerintah daerah berbasiskan e-government yang terintegrasi dengan baik, meliputi proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset milik daerah.

Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan barang milik daerah akan menjadi landasan awal bagi tatakelola pemerintahan yang lebih baik dan segala pertanggung jawaban keuangan dan barang milik daerah yang berasal dari pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Salah satu cara untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah adalah meningkatkan kepatuhan yaitu mendorong agar seluruh Perangkat Daerah mematuhi kebijakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah,

sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Bermanfaat atau tidaknya informasi hanya dapat ditentukan secara kualitas oleh pemangku kepentingan terhadap informasi yang disajikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah antara lain adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal.

2.3.1.2 Kebutuhan SDM dan Kualitas SDM

✚ Kebutuhan SDM

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dalam mengemban amanah tersebut harus ditopang oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai.

Dari hasil analisis peta jabatan dan kelas jabatan komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor membutuhkan 142 pegawai untuk melaksanakan tupoksi secara maksimal. Sedangkan saat ini dimana bezeting pegawai yang ada pada tahun 2022 berjumlah 84

pegawai, sehingga masih membutuhkan 58 pegawai dari bezeting pegawai BPKAD.

Kualitas SDM

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sangat *urgent* dan perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah baik dilingkup BPKAD maupun seluruh SKPD di Kabupaten Bogor. Sasaran dari pengembangan kualitas SDM adalah untuk meningkatkan kinerja. Kualitas SDM yang tinggi akan bermuara pada lahirnya komitmen yang kuat dalam penyelesaian tugas, sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Maka perlu adanya Sosialisasi/Bimbingan Teknis perencanaan anggaran, Pembinaan penatuasahan keuangan daerah, Pembinaan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

2.3.1.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah aplikasi terpadu sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel.

Penatausahaan Barang Milik Daerah dilakukan secara terintegrasi menggunakan Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (ATISISBADA) secara online pada seluruh SKPD. ATISISBADA merupakan Sistem Informasi Manajemen yang

berfungsi dalam pengelolaan data dan informasi barang milik daerah secara online. Didalam ATISISBADA telah disajikan menu Akuntansi yang dapat mendukung penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Kurangnya SDM dalam memahami Sistem Informasi Keuangan Daerah dan penggunaan Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (ATISISBADA) maka perlu adanya pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor.

2.3.1.4 *Pengendalian Internal*

Pengendalian internal merupakan suatu sistem dan prosedur dari sebuah organisasi untuk melindungi aset organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Dengan pengendalian internal seluruh data dari suatu bagian akan otomatis diperiksa oleh bagian lain di suatu organisasi. Pengendalian internal ini adalah cara untuk mengawasi, mengarahkan, dan mengukur kinerja dalam suatu organisasi. Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan membangun serta meningkatkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi dengan stakeholders guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Oleh karena itu BPKAD perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang ada pada unit organisasi lingkup BPKAD.

2.3.1.5 Strategi dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Pimpinan dan jajarannya harus mengintensifkan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui 9 program meliputi :

1. Pelaksanaan manajemen perubahan;
2. Penataan peraturan perundang-undangan;
3. Penataan dan penguatan organisasi;
4. Penataan tata laksana;
5. Penataan sistem manajemen SDM;
6. Penguatan pengawasan;
7. Penguatan akuntabilitas kinerja;
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik, serta
9. Monitoring dan evaluasi.

Penguatan komitmen bersama dan penyatuan langkah yang dituangkan dan dikendalikan dalam rencana aksi yang didukung oleh seluruh SKPD.

Pelaksanaan tupoksi SKPD harus didasarkan pada identifikasi dan analisis risiko. Pengelolaan aset terkait pencatatan dan pelaporan harus sesuai dengan ketentuan. Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah perlu dimanfaatkan secara optimal. Tindak lanjut temuan BPK perlu difasilitasi, termasuk lewat pembuatan rencana aksi atas temuan dan rekomendasi BPK dan pembentukan tim agar temuan dan rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti. Temuan baru tahun berjalan harus diantisipasi, dan penyusunan LKPD tahun berikutnya harus memperhatikan **saran** dan **rekomendasi** BPK pada LKPD tahun-tahun sebelumnya.

Action Plan yang terintegrasi harus disusun dalam penyusunan rencana pembangunan. Badan

Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor bertanggung jawab memastikan bahwa perencanaan tersebut selalu mengacu pada dokumen RPJMD, RKPD, Renstra Unit Kerja, serta Renja SKPD baik dalam perencanaan mulai tingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan, maupun Kabupaten.

Peningkatan evaluasi rutin dan pengawasan internal yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah juga merupakan suatu keharusan, di samping perbaikan terhadap tupoksi dan SOP dalam mendukung kewajiban implementasi SAP berbasis akrual. Dukungan regulasi sangat diperlukan untuk kepastian hukum. Teknologi informasi pun harus mendukung agar laporan berkualitas cepat, tepat, dan akurat.

Penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD paling lambat Desember tahun sebelumnya. Semua dokumen pelaksanaan anggaran dan penunjukkan pengelola keuangan dan panitia/pejabat pengadaan telah ditetapkan pada Desember tahun sebelumnya. Lelang dini dapat dilakukan setelah ada persetujuan bersama atas Rancangan Perda APBD, demi menghindari penumpukan belanja pada akhir Desember.

Upaya lain yang bisa dilakukan adalah bimbingan teknis/sosialisasi/supervisi/pendampingan tenaga ahli tentang implementasi pengelolaan keuangan yang baik kepada seluruh pengelola keuangan mulai dari pimpinan dan pejabat struktural Pemerintah Daerah terutama Bendaharawan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, sampai kepada para Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Barang. Transaksi nontunai juga dapat didorong penggunaannya

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Pelaksanaan review terhadap Rancangan Awal RKPD 2024 yaitu dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD 2024 dengan analisis hasil kebutuhan dapat dijelas pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

BAB 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

URUSAN / UNSUR : URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN

BIDANG URUSAN : KEUANGAN

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISI KEBUTUHAN						BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKAD	1. Ketepatan Penetapan RAPBD dan RAPBD Perubahan Kabupaten Bogor	Tepat/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	1,598,874,853,487	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKAD	1. Ketepatan Penetapan RAPBD dan RAPBD Perubahan Kabupaten Bogor	Tepat/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	838,987,914,756	(759,886,938,731)	
			2. Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah dengan Penerbitan SP2D	%	97				2. Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah dengan Penerbitan SP2D	%	97			
			3. Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Tepat Waktu	Tepat/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu				3. Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Tepat Waktu	Tepat/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu			

NO	RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISI KEBUTUHAN						BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD	Persentase Dokumen Penganggaran Anggaran Keuangan Daerah yang sesuai standar	%	100	4,033,800,000	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD	Persentase Dokumen Penganggaran Anggaran Keuangan Daerah yang sesuai standar	%	100	3,623,700,000	(410,100,000)	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	487,800,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	450,000,000	(37,800,000)	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	487,800,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	450,000,000	(37,800,000)	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	72	140,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	72	174,000,000	34,000,000	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA -SKPD	BPKAD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	72	140,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA -SKPD	BPKAD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	72	174,100,000	34,100,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISI KEBUTUHAN						BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	72	130,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	72	130,000,000	-	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	72	130,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	72	130,000,000	-	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	875,600,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	658,000,000	(217,600,000)	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	896,600,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	673,000,000	(223,600,000)	

NO	RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISI KEBUTUHAN						BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	50	250,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	50	250,000,000	-	
	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	1	100,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	1	100,000,000	-	
	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	1	146,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	1	146,000,000	-	
	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen	1	100,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen	1	100,000,000	-	
	Sub Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	72	150,000,000	Sub Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	72	188,600,000	38,600,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISI KEBUTUHAN						BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase Penerbitan SP2D yang Diajukan oleh Perangkat Daerah	%	100	1,972,000,000	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase Penerbitan SP2D yang Diajukan oleh Perangkat Daerah	%	100	1,754,500,000	(217,500,000)	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	12	404,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	12	280,000,000	(124,000,000)	
	Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	500	283,000,000	Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	500	189,500,000	(93,500,000)	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	1	250,000,000	Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	1	250,000,000	-	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	12	250,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	12	250,000,000	-	

NO	RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISI KEBUTUHAN						BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	5	250,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	5	250,000,000	-	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKAD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Dokumen	2	60,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKAD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Dokumen	2	60,000,000	-	
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	1	65,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	1	65,000,000	-	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISI KEBUTUHAN						BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	1	200,000,000	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	1	200,000,000	-	
	Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BPKAD	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1	60,000,000	Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BPKAD	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1	60,000,000	-	
	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	72	150,000,000	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	72	150,000,000	-	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISI KEBUTUHAN						BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi standar	%	100	1,350,000,000	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi standar	%	100	1,374,596,574	24,596,574	
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	1	245,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	1	225,000,000	(20,000,000)	
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	19	300,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	19	342,000,000	42,000,000	
	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	1	100,000,000	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	1	100,000,000	-	

NO	RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISI KEBUTUHAN						BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	200,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	200,000,000	-	
	Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	100,000,000	Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	102,166,180	2,166,180	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	12	80,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	12	80,430,394	430,394	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISI KEBUTUHAN						BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi	Dokumen Raperbup	1	175,000,000	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi	Dokumen Raperbup	1	175,000,000	-	
	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	72	150,000,000	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	72	150,000,000	-	
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase penerbitan SP2D Bantuan Keuangan yang tepat waktu	%	100	1,590,894,053,487	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase penerbitan SP2D Bantuan Keuangan yang tepat waktu	%	100	831,608,668,182	(759,285,385,305)	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	50,000,000	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	50,000,000	-	
	Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan	1	50,000,000	Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan	1	50,000,000	-	

NO	RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISI KEBUTUHAN						BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Sub Kegiatan Analisa Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	1	1,309,390,796,342	Sub Kegiatan Analisa Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	1	570,644,096,000	(738,746,700,342)	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	58,968,165,155	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	30,000,000,000	(28,968,165,155)	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	1	222,435,091,990	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	1	230,864,572,182	8,429,480,192	
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Persentase data dan informasi yang akurat dan mutakhir	%	100	625,000,000	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Persentase data dan informasi yang akurat dan mutakhir	%	100	626,450,000	1,450,000	
	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1	50,000,000	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1	50,000,000	-	
	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1	425,000,000	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1	210,500,000	(214,500,000)	
	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	72	150,000,000	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	72	365,950,000	215,950,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISI KEBUTUHAN						BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik	%	90	1,992,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik	%	90	1,915,000,000	(77,000,000)	
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Penatausahaanya tepat waktu	%	90	1,992,000,000	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Penatausahaanya tepat waktu	%	90	1,915,000,000	(77,000,000)	
	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	BPKAD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen Rancangan Perbup	2	185,000,000	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	BPKAD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen Rancangan Perbup	2	185,000,000	-	
	Sub Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	110,000,000	Sub Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	110,000,000	-	
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	185,000,000	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	175,000,000	(10,000,000)	
	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen Rancangan Perbup	1	60,000,000	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen Rancangan Perbup	1	60,000,000	-	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	160,000,000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	160,000,000	-	
	Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	1	100,000,000	Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	1	100,000,000	-	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISI KEBUTUHAN						BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1	300,000,000	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1	250,000,000	(50,000,000)	
	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	2	200,000,000	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	2	200,000,000	-	
	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	192,000,000	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	175,000,000	(17,000,000)	
	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	750	150,000,000	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	750	150,000,000	-	
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	2	100,000,000	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	2	100,000,000	-	
	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	2	100,000,000	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	2	100,000,000	-	
	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	72	150,000,000	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	72	150,000,000	-	

NO	RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISI KEBUTUHAN						BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Nilai SAKIP BPKAD	Kategori	BB	64,206,648,353	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Nilai SAKIP BPKAD	Kategori	BB	48,420,146,566	(15,786,501,787)	
	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan	%	100	710,000,000	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan	%	100	710,000,000	-	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	200,000,000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	200,000,000	-	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	50,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	1	50,000,000	-	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	50,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	50,000,000	-	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISI KEBUTUHAN						BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	30,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	30,000,000	-	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	30,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	30,000,000	-	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7	140,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7	140,000,000	-	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	17	210,000,000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	17	210,000,000	-	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISI KEBUTUHAN						BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Kegiatan Administrasi Keuangan		Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	%	100	37,823,928,353	Kegiatan Administrasi Keuangan		Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	%	100	39,612,869,140	1,788,940,787	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	97	37,538,928,353	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	97	39,327,869,140	1,788,940,787	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	60,000,000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	60,000,000	-	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	30,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	30,000,000	-	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	30,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	30,000,000	-	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	24	150,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	24	150,000,000	-	
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BPKAD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	15,000,000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BPKAD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	15,000,000	-	

NO	RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISI KEBUTUHAN						BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase aset yang tercatat lingkup BPKAD	%	100	50,000,000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase aset yang tercatat lingkup BPKAD	%	100	50,000,000	-	
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	15,000,000	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	15,000,000	-	
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	20,000,000	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	20,000,000	-	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	15,000,000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	15,000,000	-	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	%	100	355,000,000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	%	100	355,000,000	-	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKAD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	3	150,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKAD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	3	150,000,000	-	
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BPKAD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	20,000,000	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BPKAD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	20,000,000	-	

NO	RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISI KEBUTUHAN						BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	20,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	20,000,000	-	
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	BPKAD	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	93	20,000,000	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	BPKAD	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	93	20,000,000	-	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BPKAD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	150	120,000,000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BPKAD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	150	120,000,000	-	
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	25,000,000	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	25,000,000	-	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISI KEBUTUHAN						BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKAD	Persentase unit kerja lingkup BPKAD yang terpenuhi kebutuhan administrasi umumnya	%	100	1,040,000,000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKAD	Persentase unit kerja lingkup BPKAD yang terpenuhi kebutuhan administrasi umumnya	%	100	1,144,982,000	104,982,000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	45,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	45,000,000	-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	200,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	200,000,000	-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	95,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	99,982,000	4,982,000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKAD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	100,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKAD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	200,000,000	100,000,000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPKAD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	100,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPKAD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	100,000,000	-	

NO	RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISI KEBUTUHAN						BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKAD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	100,000,000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKAD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	100,000,000	-	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	157	400,000,000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	157	400,000,000	-	
			- Perjalanan Dinas Dalam Daerah						- Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
			- Perjalanan Dinas Luar Daerah						- Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase unit kerja lingkup BPKAD yang terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarananya	%	100	20,932,720,000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase unit kerja lingkup BPKAD yang terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarananya	%	100	2,792,720,000	(18,140,000,000)	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Roda 4 dan Roda 2)	Unit Beli (R2) Sewa (R4)	2 27	756,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Roda 4 dan Roda 2)	Unit Beli (R2) Sewa (R4)	2 27	2,616,000,000	1,860,000,000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	20,000,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	(20,000,000,000)	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100,860,000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100,860,000	-	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	75,860,000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	75,860,000	-	

NO	RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISI KEBUTUHAN						BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase unit kerja lingkup BPKAD yang terlayani jasa penunjang	%	100	2,260,000,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase unit kerja lingkup BPKAD yang terlayani jasa penunjang	%	100	2,410,375,426	150,375,426	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	350,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	352,992,143	2,992,143	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	805,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	921,000,000	116,000,000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1,105,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1,136,383,283	31,383,283	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISI KEBUTUHAN						BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana lingkup BPKAD dalam kondisi baik	%	100	1,035,000,000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana lingkup BPKAD dalam kondisi baik	%	100	1,344,200,000	309,200,000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKAD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Kendaraan Roda 4)	Unit	9	160,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKAD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Kendaraan Roda 4)	Unit	9	150,000,000	(10,000,000)	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - Kendaraan Roda 2 - Kendaraan Roda 4	Unit	68	250,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - Kendaraan Roda 2 - Kendaraan Roda 4	Unit	68	569,200,000	319,200,000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	BPKAD	Jumlah Mebeulair Yang Terpelihara	Unit	2	50,000,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	BPKAD	Jumlah Mebeulair Yang Terpelihara	Unit	2	50,000,000	-	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISI KEBUTUHAN						BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	BPKAD	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Aplikasi	2	150,000,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	BPKAD	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Aplikasi	2	150,000,000	-	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	125,000,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	125,000,000	-	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	150,000,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	150,000,000	-	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	150,000,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	150,000,000	-	
JUMLAH TOTAL						1,665,073,501,840						889,323,061,322	(775,750,440,518)	

Dari hasil review persandingan dapat di jelaskan sebagai berikut :

- ✚ Jumlah program pada Rancangan Awal RKPD 2024 dan hasil analisis kebutuhan sebanyak 3 program.
- ✚ Jumlah kegiatan pada Rancangan Awal RKPD 2024 dan hasil analisis kebutuhan sebanyak 3 kegiatan
- ✚ Jumlah sub kegiatan pada Rancangan Awal RKPD 2024 sebanyak 95 sub kegiatan dan hasil analisis kebutuhan sebanyak 94 sub kegiatan, adanya 1 sub kegiatan hasil analisis kebutuhan perlu di repocusing yaitu sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- ✚ Jumlah anggaran pada Rancangan Awal RKPD 2024 sebesar Rp. 1.665.073.501.840,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 889.323.061.322,-

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan, untuk perencanaan tahun 2024 ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat maupun para stakeholder lainnya yang masuk pada kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor yaitu usulan bantuan keuangan infrastruktur desa untuk 416 desa.

Sedangkan hasil penyelarasan masukan dari para stakeholder melalui Forum Perangkat Daerah ataupun usulan pada forum-forum resmi lainnya terhadap program/kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tahun 2024 menunjukkan ada perubahan pada usulan awal sehingga rumusan kebutuhan program dan kegiatan sama dengan rancangan awal RKPD BPKAD Tahun 2024, sebagaimana Tabel 2.5 sebagai berikut :

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024					
Kabupaten Bogor					
URUSAN / UNSUR		: URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN			
BIDANG URUSAN		: KEUANGAN			
PERANGKAT DAERAH		: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	VOLUME
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	<i>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</i>				
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus I kepada Desa	Desa	Jumlah Desa yang memperoleh bantuan keuangan khusus	Desa	416

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Penyajian Matrik Rencana Program dan Kegiatan yang digunakan dalam Bab ini adalah mengacu kepada: (i) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82), (ii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), serta (iii) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (iv) Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2025.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024, mengacu kepada permasalahan hasil evaluasi peiaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor, hasil evaluasi kinerja RKPD, prioritas nasional dalam rancangan awal RKPD, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor tidak terlepas dari kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat. Untuk itu dilakukan pemetaan antara tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi. Adapun telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Propinsi ditampilkan pada Tabel berikut :

**Tabel
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	KEBIJAKAN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA	SINERGI DENGAN BIDANG URUSAN
1	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik	<p>Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas (Kemenkeu)</p> <p>Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif (Kemenkeu)</p> <p>Penguatan implementasi transformasi ekonomi di daerah :</p> <p>(i) Peningkatan pendapatan asli daerah, investasi daerah, pemanfaatan dana daerah dan aset daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, mencapai target ekonomi makro nasional maupun indikator ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, optimalisasi mandatory spending infrastruktur pro investas (Kemendagri)</p>	Ururusan Penunjang Pemerintahan Bidang Urusan Keuangan

**Tabel
Telaahan Terhadap Kebijakan Propinsi Jawa Barat**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT	KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI	SINERGI DENGAN BIDANG URUSAN
1	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	<p>Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tinggi</p> <p>Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah Tinggi</p>	Ururusan Penunjang Pemerintahan Bidang Urusan Keuangan

Adanya keterkaitan antara Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, serta keterkaitannya dengan Renja K/L vertikal dan Renja Provinsi Jawa Barat.

✚ Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
		TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Penetapan RAPBD dan RAPBD Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor	Tepat Waktu	Tepat/Tidak Tepat Waktu	838,987,914,756
			Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah dengan Penerbitan SP2D	97	%	
			Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat Waktu	Tepat/Tidak Tepat Waktu	
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik	90	%	1,915,000,000
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Baik, Bersih, dan Efektif	Nilai SAKIP	BB	Kategori	48,420,146,566
	JUMLAH					

✚ Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2024

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 terhadap Prioritas Pembangunan Jawa Barat Berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat
Tahun 2024

PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
		TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan Daya Saing Perekonomiam Daerah dan Pelayanan Publik dalam rangka Pemulihan Ekonomi Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Penetapan RAPBD dan RAPBD Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor	Tepat Waktu	Tepat/Tidak Tepat Waktu	838,987,914,756
			Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah dengan Penerbitan SP2D	97	%	
			Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat Waktu	Tepat/Tidak Tepat Waktu	
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik	90	%	1,915,000,000
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Baik, Bersih, dan Efektif	Nilai SAKIP	BB	Kategori	48,420,146,566
JUMLAH						889,323,061,322

Telaahan Terhadap Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026

Tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas;
2. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
3. Terwujudnya Kabupaten Bogor yang Berdaya Saing;
4. Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dari 4 (empat) tujuan RPD yang berkaitan langsung dengan tupoksi BPKAD adalah Tujuan yang ke 2 (dua) yaitu *Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik*, dengan **Indikator Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi**.

Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yang berkaitan dengan langsung dengan tupoksi BPKAD adalah *Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah* dengan **Indikator Sasaran** *Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.

Indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2024 dan berkaitan langsung dengan tupoksi BPKAD sebagaimana tabel berikut :

Tabel

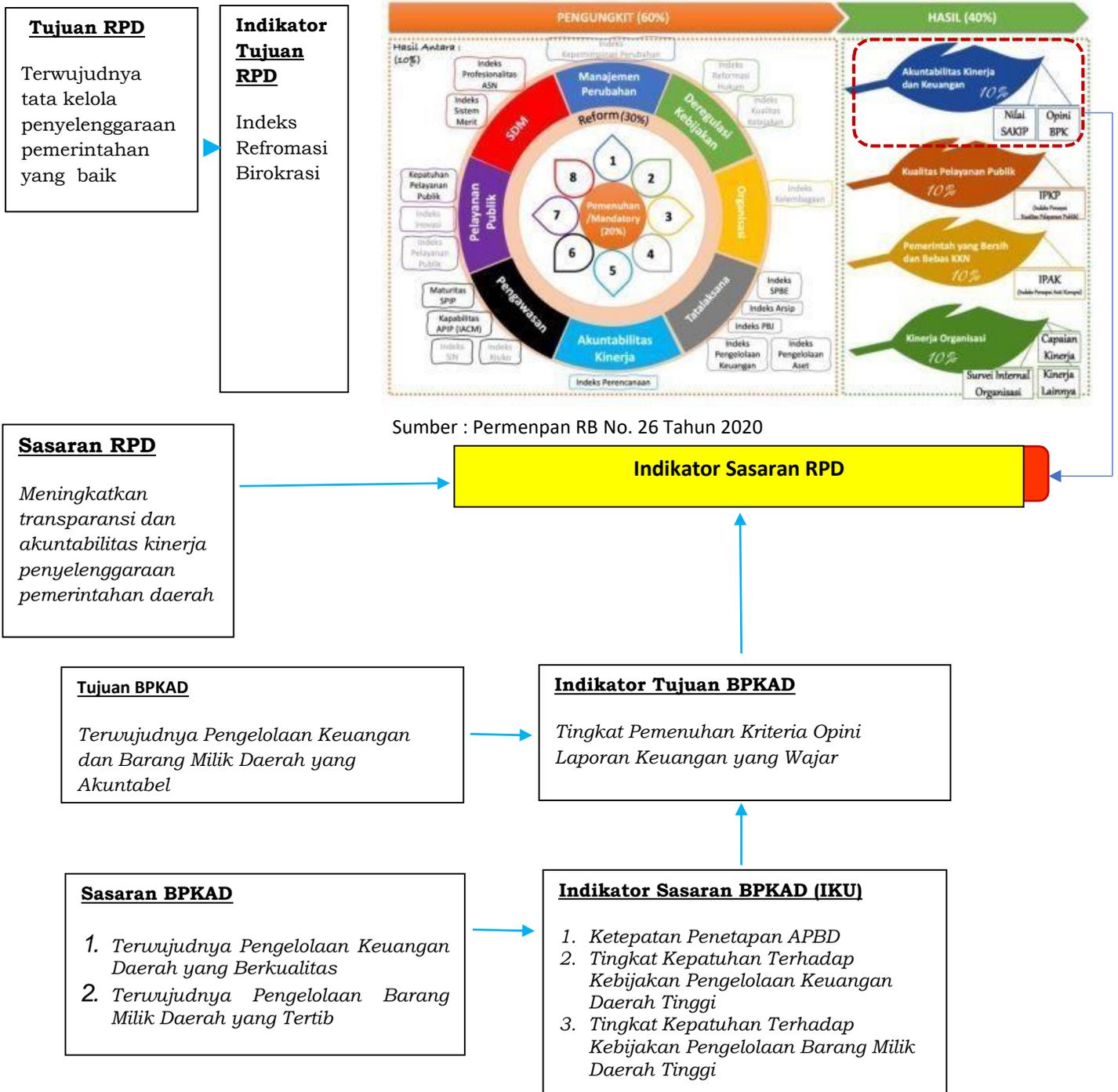
Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

Tujuan RPD : Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik				
Indikator Tujuan RPD	Satuan	2024	2025	2026
Indeks Refromasi Birokrasi	Poin	68,28	70,00	71,14
Sasaran RPD : Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah				
Indikator Sasaran RPD	Satuan	2024	2025	2026
Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP

Sumber : RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026

Bagan. 3.1

Penjabaran Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama BPKAD Tahun 2024



Sumber : Permenpan RB No. 26 Tahun 2020

Pengertian dari Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya yang luar biasa.

Selain itu, reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.

Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Reformasi birokrasi dilaksanakan di segala aspek, salah satunya adalah aspek akuntabilitas kinerja dan keuangan. Salah satu tolak ukur penilaian atas pengelolaan keuangan yang baik adalah diperolehnya opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor dan Opini WTP dari BPK atas LKPD juga sebagai salah satu unsur penilaian indeks reformasi birokrasi.

Salah satu wujud tata kelola keuangan organisasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor adalah melakukan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dengan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah guna mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor memedomani RKPD, terkait dukungan terhadap :

1. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024;
2. Keterkaitan dengan Prioritas Pembangunan Nasional;
3. Keterkaitan dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat.

✚ Prioritas Pembangunan Daerah pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 antara lain :

- a) Stabilitas ekonomi daerah;
- b) Peningkatan tata kelola pelayanan publik, kinerja aparatur, dan penataan administrasi;
- c) Pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bogor dalam melaksanakan Tujuan dan Sasaran mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang ke-2 yaitu *Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi*.

Urusan Bidang Keuangan. Prioritas pembangunan bidang keuangan diarahkan pada sistem pengelolaan keuangan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik.

Arah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah;
4. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup;
5. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum;
6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bogor dalam melaksanakan Tujuan dan Sasaran mengacu pada arah kebijakan

pemerintah daerah yang ke-6 yaitu *Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah*

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah keterkaitan antara Program Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra BPKAD 2024-2026 dapat di jelaskan oleh tabel-tabel sebagai berikut :

Tabel

Keterkaitan Program Tahun 2024 BPKAD terhadap RPD Tahun 2024

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	OUTCOME		TARGET	
		TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN
1	2	3	4	5	6
Peningkatan tata kelola pelayanan publik, kinerja aparatur, dan penataan administrasi	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Penetapan RAPBD dan RAPBD Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor	Tepat Waktu	Tepat /Tidak Tepat Waktu
			Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah dengan Penerbitan SP2D	97	%
			Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat Waktu	Tepat /Tidak Tepat Waktu
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik	90	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Baik, Bersih, dan Efektif	Nilai SAKIP BPKAD	BB	Kategori

Kebijakan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang pertama adalah pengelolaan keuangan daerah seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang mengamanahkan kewajiban seluruh pemerintah daerah untuk menggunakan satu aplikasi perencanaan yang terintegrasi secara nasional, yang meliputi sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini direfleksikan pada sasaran pertama yang ingin dicapai oleh BPKAD Kabupaten Bogor yaitu *Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah*

yang Berkualitas yang pada Tahun 2024 dituangkan dalam 1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedangkan kebijakan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang kedua adalah pengelolaan barang milik daerah seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini direfleksikan pada sasaran kedua yang ingin dicapai oleh BPKAD Kabupaten Bogor yaitu *Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib* yang pada Tahun 2024 dituangkan dalam Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Isu strategis yang diangkat terkait dengan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Bogor adalah Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah. Hal ini terkait dengan isu strategis Provinsi yaitu “Meningkatkan Profesionalisme Aparatur yang Berbasis Nilai-Nilai Keagamaan, Efisiensi Birokrasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah yang Bermuara Kepada Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi”. Isu ini terkait juga dengan isu Strategis Nasional yaitu “*Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah yang Partisipatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif*”.

Tabel 3.3 Dukungan terhadap Arah Kebijakan Nasional

KEBIJAKAN NASIONAL	TUGAS DAN FUNGSI YANG MENDUKUNG	BIDANG/SEKSI/SUBID /UPT PENGAMPU
1	2	3
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Badan yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi Penunjang Keuangan	Bidang Anggaran Bidang Perbendaharaan, dan Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi
	Badan yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Barang Daerah	Bidang Aset

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

✚ **Tujuan** adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor seperti yang diatur dalam eraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2) serta Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24). Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, maka BPKAD Kabupaten Bogor akan dapat

mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Mengacu pada tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor yaitu “*Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik*” maka ditetapkan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2024-2026.

3.3.1. Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor

Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor yang akan dicapai dijadikan dasar dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2024-2026 adalah *Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel* dengan **indikator tujuan** *Tingkat Pemenuhan Kriteria Opini Laporan Keuangan yang Wajar*.

Pencapaian tujuan BPKAD dapat diukur dengan pemenuhan indikator dibawah ini :

Tabel

Perumusan Indikator Tujuan BPKAD Tahun 2024
Berdasarkan Renstra 2024 – 2026 BPKAD

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	CARA PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA
					TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Tingkat Pemenuhan Kriteria Opini Laporan Keuangan yang Wajar	Keterpenuhan Kriteria Opini Laporan Keuangan yang Wajar : 1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan 2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) 3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 4. efektifitas sistem pengendalian intern	Kriteria	4

3.3.2. Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. **sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)** Kabupaten Bogor tahun 2024-2026 adalah “**Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah**”, dengan **Indikator Sasaran** Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Adapun **sasaran** yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

1. *Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas;*

Akuntabilitas keuangan pemerintah memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. **Pertanggungjawaban** yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntabilitas pemerintah juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses **manajerial**, seperti perencanaan, penganggaran, pengawasan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah. akuntabilitas pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat **pengawas** fungsional secara efektif dan efisien. Terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah akan menjadi landasan awal bagi tatakelola pemerintahan yang lebih baik dan segala pertanggung jawaban keuangan yang berasal dari dana masyarakat akan berjalan lancar, Hal ini tak lepas dari **berkualitasnya** Laporan keuangan yang di sajikan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah terus meningkat.

Pencapaian sasaran *Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas* diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) atau indikator sebagai berikut :

- ✚ *Ketepatan Penetapan APBD.*
- ✚ *Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tinggi.*

Target indikator ini didukung melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. *Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib*

Pengelolaan asset atau barang milik daerah sebagaimana pengelolaan keuangan daerah juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabilitas yang sesuai dengan prinsip *good governance*.

Fungsi dari pengelolaan barang milik daerah adalah untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat agar lebih optimal melalui:

- a. Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, baik menyangkut inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah;
- b. Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah;
- c. Pengamanan aset daerah dan;
- d. Tersedianya data atau informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.

Dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2016 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan barang daerah adalah Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Untuk melakukan pengelolaan aset yang baik, pemerintah pusat maupun daerah telah menyusun kebijakan pengelolaan aset pada setiap tahapannya sesuai dengan

Permendagri Nomor 19 tahun 2016. Sesuai dengan tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, maka BPKAD akan mendorong agar Perangkat Daerah dapat mematuhi kebijakan pengelolaan aset daerah sehingga pengelolaan barang milik daerah menjadi tertib.

Pencapaian Sasaran *Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib*, diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) atau indikator yaitu :

- ✚ *Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tinggi.*

Target indikator ini akan dicapai melalui Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pencapaian **Sasaran** BPKAD Kabupaten Bogor dapat diukur dengan pemenuhan indikator dibawah ini :

Tabel

Perumusan Indikator Sasaran BPKAD Tahun 2024
Berdasarkan Renstra 2024 – 2026 BPKAD

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	CARA PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET
					2024
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	1. Ketepatan Penetapan APBD	<i>Ketepatan penetapan penyusunan RAPBD sesuai dengan ketentuan dan tidak melebihi tahun berjalan</i>	Tepat /Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu
		2. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tinggi	<i>Jumlah kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah Per Perangkat Daerah Kali 100</i>	%	90
2.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	1. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tinggi	<i>Jumlah kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan barang milik daerah Per Perangkat Daerah Kali 100</i>	%	90

Pencapaian Sasaran Penunjang *Meningkatnya Tata Kelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Baik, Bersih, dan Efektif.*

Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator yaitu :

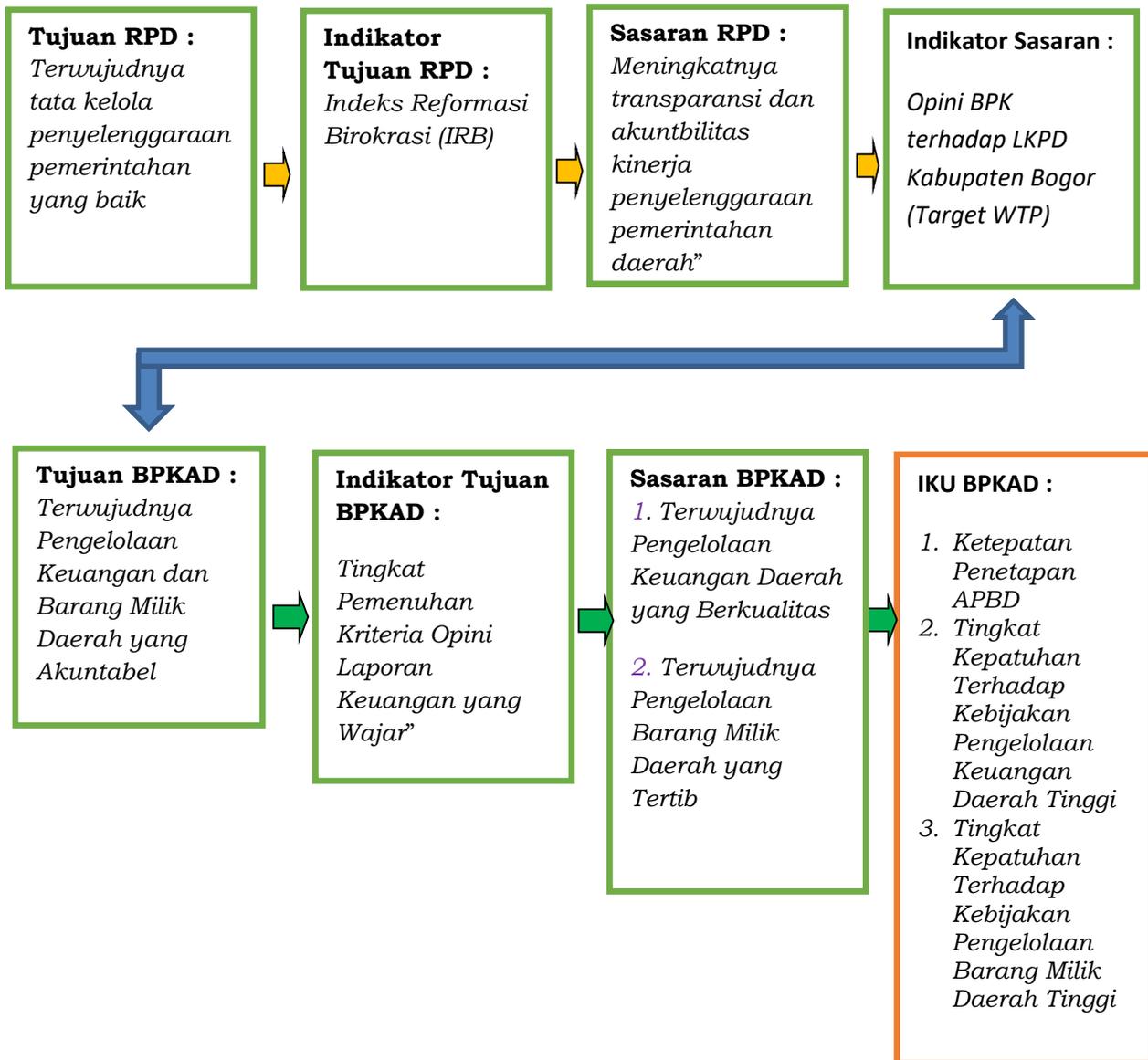
- ✚ *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan target kinerja tahun 2024 sebesar 79.78 Poin.*

Target indikator ini akan dicapai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- ✚ Adapun Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama BPKAD dapat disajikan pada bagan sebagai berikut :

Bagan 3.2

Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama BPKAD



Sedangkan **Tujuan** dan **sasaran** yang akan dicapai pada Rencana Kerja BPKAD Tahun 2024 ditampilkan pada Tabel 3.4.

Tabel. 3.4
TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2024
BERDASARKAN RENSTRA 2024-2026 BPKAD

Urusan/Unsur : Penunjang Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan : Keuangan

TUJUAN DAN SASARAN PEMERINTAH DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PEMERINTAH DAERAH	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	RUMUS	TARGET TAHUN 2024	
					SATUAN	VOLUME
1	2	3	4	5	6	7
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TUJUAN	INDIKATOR SASARAN			
Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Tingkat Pemenuhan Kriteria Opini Laporan Keuangan yang Wajar	<i>Keterpenuhan Kriteria WTP</i>	Kriteria	4
				<i>1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan</i>		
				<i>2. Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosures)</i>		
				<i>3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan</i>		
<i>4. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern</i>						
SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IKU)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IKU)			
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	1. Ketepatan Penetapan APBD	<i>Ketepatan penetapan penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan dan tidak melebihi tahun berjalan</i>	Tepat/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu
			2. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tinggi	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan-kebijakan pengelolaan Keuangan per Jumlah Perangkat Daerah dikali 100</i>		
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	1. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tinggi	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan-kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah per Jumlah Perangkat Daerah dikali 100</i>	%	90

Mengacu pada tujuan, dan sasaran Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut di atas maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2024-2026 yang tertuang dalam Renstra BPKAD Tahun 2024-2026.

Tujuan yang hendak dicapai BPKAD adalah *Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel*. Adapun sasaran BPKAD pada Tahun 2024 ada 2 (dua) sasaran yaitu (1) Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas dan (2) Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib. Pencapaian Sasaran BPKAD ini diukur melalui Indikator Sasaran yaitu tertera pada Tabel berikut :

Tabel. Indikator Sasaran BPKAD Tahun 2024 Berdasarkan Renstra 2024-2026 BPKAD

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	1. Ketepatan Penetapan APBD	100% (Tepat Waktu)
		2. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tinggi	90%
2.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	1. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tinggi	90%

Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Tahun 2024 yaitu :

1. Ketepatan Penetapan APBD dengan target tepat waktu atau 100%;
2. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tinggi dengan Target 90%;
3. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tinggi dengan Target 90%.

- Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai oleh BPKAD diupayakan melalui beberapa program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator program sebagai Tabel berikut :

Tabel. Indikator Program BPKAD Tahun 2024 Berdasarkan Renstra 2024-2026 BPKAD

No	Program	Indikator Program	Target Tahun 2024
1.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Penetapan RAPBD dan RAPBD Perubahan Kabupaten Bogor	Tepat Waktu
		Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah dengan Penerbitan SP2D	97%
		Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik	90%

- Untuk Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari beberapa kegiatan yang indikator-indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2024
1.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Anggaran Keuangan Daerah yang sesuai standar	100%
2.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penerbitan SP2D yang diajukan oleh Perangkat Daerah	100%
3.	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penerbitan SP2D Bantuan Keuangan yang tepat waktu	100%
4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi standar	100%
5.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase data dan informasi yang akurat dan mutakhir	100%

- Sedangkan untuk Program Pengelolaan Barang Milik Daerah indikator kegiatannya adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2024
1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Penatausahaanya tepat waktu	90%

Tabel. Indikator Program Penunjang BPKAD Tahun 2024 Berdasarkan Renstra 2024-2026 BPKAD

No	Program	Indikator Program	Target Tahun 2024
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP BPKAD	BB

3.3. Program dan Kegiatan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang keuangan. Untuk itu, disusun tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Renstra BPKAD 2024-2026, maka pada Tahun Anggaran 2024 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024.

PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PENGAMPU
1	2	3	4	5
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1	12	3,623,700,000	BIDANG ANGGARAN DAN BIDANG PERBENDAHARAAN
	2	14	833.363.168.182	BIDANG ANGGARAN DAN BIDANG PERBENDAHARAAN
	2	11	2.001.046.574	BIDANG AKUNTANSI DAN TEKNOLOGI INFORMASI
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1	12	1.915.000.000	BIDANG ASET
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	8	42	48.420.146.566	SEKRETARIAT
JUMLAH	14	91	889.323.061.322	

Program pada Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Bogor untuk Tahun 2024 berdasarkan Renstra 2024 – 2026 BPKAD adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - ✚ Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 5 (lima) Kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan.
 - ✚ Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 12 (dua belas) Sub Kegiatan.
 - ✚ Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan dan 42 (empat puluh dua) Sub Kegiatan.

Dari 3 Program diatas kemudian dijabarkan menjadi kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

**Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan BPKAD Kabupaten Bogor
Tahun 2024**

Kode Rekening	Uraian Program - Kegiatan - Sub Kegiatan
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.02.2.01	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
5.02.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
5.02.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
5.02.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
5.02.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA -SKPD
5.02.02.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
5.02.02.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
5.02.02.2.01.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
5.02.02.2.01.0008	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
5.02.02.2.01.0009	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
5.02.02.2.01.0010	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
5.02.02.2.01.0011	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
5.02.02.2.01.12	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
5.02.02.2.02	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
5.02.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

5.02.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
5.02.02.2.02.0004	Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah
5.02.02.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
5.02.02.2.02.0006	Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
5.02.02.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
5.02.02.2.02.0008	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
5.02.02.2.02.0009	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
5.02.02.2.02.0010	Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
5.02.02.2.02.0011	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02.02.2.03	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5.02.02.2.03.0001	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
5.02.02.2.03.0003	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
5.02.02.2.03.0004	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA

5.02.02.2.03.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
5.02.02.2.03.0006	Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5.02.02.2.03.0007	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
5.02.02.2.03.0009	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
5.02.02.2.03.0011	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02.02.2.04	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.02.2.04.0002	Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah
5.02.02.2.04.0008	Sub Kegiatan Analisa Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
5.02.02.2.04.0009	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Menedesak
5.02.02.2.04.0010	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
5.02.02.2.05	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
5.02.02.2.05.0002	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
5.02.02.2.05.0003	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

5.02.03.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga
5.02.03.2.01.0002	Sub Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.0005	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.0006	Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.0007	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.0008	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.0009	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.0010	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.0011	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.0012	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.0013	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.02.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.02.01.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

5.02.01.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
5.02.01.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5.02.01.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
5.02.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.02.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan
5.02.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.02.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5.02.01.2.02.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5.02.01.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.02.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5.02.01.2.02.0008	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
5.02.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5.02.01.2.03.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
5.02.01.2.03.0002	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
5.02.01.2.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
5.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.02.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5.02.01.2.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

5.02.01.2.05.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
5.02.01.2.05.0005	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
5.02.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.02.01.2.05.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.02.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.02.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.02.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.02.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.02.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.02.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
5.02.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.02.01.2.07.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5.02.01.2.07.0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.02.01.2.07.0011	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.02.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

5.02.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.02.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.02.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5.02.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5.02.01.2.09.0005	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
5.02.01.2.09.0008	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
5.02.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.02.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.02.01.2.09.0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam dokumen perencanaan penetapan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan akan menjadi lebih implementatif jika sudah dijabarkan dalam program kegiatan termasuk dengan pendanaannya. Maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dalam menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 berdasarkan Renstra tahun 2024-2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 telah menjabarkan sasaran dan arah kebijakan kedalam program/kegiatan utama dan program/kegiatan penunjang. Dinamika dalam proses perencanaan selalu terjadi mengikuti adanya perubahan peraturan-peraturan ataupun peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun daerah, sehingga dokumen perencanaan pun akan menyesuaikan seperti adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang tentang Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang tentang Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang telah disusun hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.

- **Tujuan** yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor adalah *Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel*.

Indikator tujuan BPKAD adalah *Tingkat Pemenuhan Kriteria Opini Laporan Keuangan yang Wajar*

- **sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)** Kabupaten Bogor tahun 2024-2026 adalah “**Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah**”, dengan **Indikator Sasaran** Opini BPK terhadap *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.

Adapun **sasaran** yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

1. *Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas;*
2. *Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib.*

- ✓ **Pencapaian sasaran pertama** *Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas* diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) atau indikator sebagai berikut :

- ✚ *Ketepatan Penetapan APBD dengan target kinerja “Tepat Waktu”.*
- ✚ *Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tinggi dengan target kinerja 90,00%.*

Target indikator ini akan dicapai melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel. Indikator Program BPKAD Tahun 2024 Berdasarkan Renstra 2024-2026

No	Program	Indikator Program	Target Tahun 2024
1.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Penetapan RAPBD dan RAPBD Perubahan Kabupaten Bogor	Tepat Waktu
		Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah dengan Penerbitan SP2D	97%
		Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Tepat Waktu	Tepat Waktu

- Untuk Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari beberapa kegiatan yang indikator-indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2024
1.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Anggaran Keuangan Daerah yang sesuai standar	100%
2.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penerbitan SP2D yang diajukan oleh Perangkat Daerah	100%
3.	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penerbitan SP2D Bantuan Keuangan yang tepat waktu	100%
4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi standar	100%
5.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase data dan informasi yang akurat dan mutakhir	100%

Pencapaian Sasaran yang kedua yaitu *Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib*, Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) atau indikator yaitu :

- ✚ *Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tinggi dengan target kinerja 90,00%.*

Target indikator ini akan dicapai melalui Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Tabel. Indikator Program BPKAD Tahun 2024 Berdasarkan Renstra 2024-2026

No	Program	Indikator Program	Target Tahun 2024
2.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik	90%

- Sedangkan untuk Program Pengelolaan Barang Milik Daerah hanya didukung oleh satu kegiatan dengan indikator kegiatannya adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2024
1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Penatausahaanya tepat waktu	90%

Pencapaian Sasaran Penunjang Meningkatkan Pelayanan Kewenangan Daerah Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator yaitu :

✚ *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan target kinerja tahun 2024 sebesar 79.76 Poin.*

Target indikator ini akan dicapai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Program	Indikator Program	Target Tahun 2024
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP BPKAD	BB

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh beberapa kegiatan dengan indikator sebagai berikut :

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2024
1.	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan	100%
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	100%
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase aset yang tercatat lingkup BPKAD	100%
4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	100%
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja lingkup BPKAD yang terpenuhi kebutuhan administrasi umumnya	100%
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase unit kerja lingkup BPKAD yang terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarananya	100%
7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja lingkup BPKAD yang terlayani jasa penunjang	100%

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2024
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana lingkup BPKAD dalam kondisi baik	100%

Sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor berdasarkan Renstra BPKAD Kabupaten Bogor 2024-2026, maka Rencana Kerja (Renja) pada Tahun Anggaran 2024 disesuaikan dengan RKPD 2024 yang telah ditetapkan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan sesuai RKPD 2024 yang telah ditetapkan adalah tertera pada Tabel sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024.

PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PENGAMPU
1	2	3	4	5
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1	12	3,627,098,892	BIDANG ANGGARAN DAN BIDANG PERBENDAHARAAN
	2	14	833.363.168.182	BIDANG ANGGARAN DAN BIDANG PERBENDAHARAAN
	2	11	2.001.046.574	BIDANG AKUNTANSI DAN TEKNOLOGI INFORMASI
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1	12	1.90.974.652	BIDANG ASET
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	8	42	48.421.983.133	SEKRETARIAT
JUMLAH	14	91	889.323.061.322	

Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026 BPKAD Kabupaten Bogor dapat dijabarkan pada Tabel 4.1. berikut ini :

Tabel 4.1.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024

Urusan : Penunjang Urusan Pemerintahan
 Bidang Urusan : Keuangan
 Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET TAHUN 2024				PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
						VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Ketepatan Penetapan RAPBD dan RAPBD Perubahan Kabupaten Bogor	Tepat/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	838,991,103,537	BPKAD	APBD	Tepat Waktu	1,646,817,035,750	Bidang Anggaran
				2. Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah dengan Penerbitan SP2D	%	97				98		Bidang Perbendaharaan
				3. Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Tepat Waktu	Tepat/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu					Tepat Waktu	
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Perencanaan Anggaran Daerah Memenuhi Standar	Persentase Dokumen Penganggaran Anggaran Keuangan Daerah yang sesuai standar	%	100	3,627,098,892	BPKAD	APBD	100	3,871,970,952	Bidang Anggaran dan Bidang Perbendaharaan
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	449,999,939	BPKAD	APBD	1	499,995,000	Kelompok Jabatan Fungsional
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	449,999,901	BPKAD	APBD	1	499,995,000	Kelompok Jabatan Fungsional
		Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	72	173,999,827	BPKAD	APBD	72	178,350,000	Sub Bidang Anggaran Belanja pada Bidang Anggaran

IV-8

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET TAHUN 2024				PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
						VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA -SKPD	Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	72	174,099,892	BPKAD	APBD	72	178,178,452	Sub Bidang Anggaran Belanja pada Bidang Anggaran
		Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	72	130,006,769	BPKAD	APBD	72	133,250,000	Sub Bidang Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan
		Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	72	129,992,430	BPKAD	APBD	72	133,250,000	Sub Bidang Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	768,000,198	BPKAD	APBD	2	819,077,500	Sub Bidang Anggaran Belanja pada Bidang Anggaran
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	755,000,148	BPKAD	APBD	2	818,975,000	Sub Bidang Anggaran Belanja pada Bidang Anggaran

IV-9

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET TAHUN 2024				PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
						VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	50	249,999,991	BPKAD	APBD	50	256,250,000	Kelompok Jabatan Fungsional
		Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	1	99,999,995	BPKAD	APBD	1	102,500,000	Sub Bidang Anggaran PPKD pada Bidang Anggaran
		Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	1	145,999,985	BPKAD	APBD	1	149,650,000	Sub Bidang Anggaran PPKD pada Bidang Anggaran
		Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen	1	99,999,817	BPKAD	APBD	1	102,500,000	Sub Bidang Anggaran PPKD pada Bidang Anggaran

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET TAHUN 2024				PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
						VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Penatausahaan Daerah Memenuhi Standar	Persentase Penerbitan SP2D yang Diajukan oleh Perangkat Daerah	%	100	1,804,412,751			100	1,849,612,500	Bidang Perbendaharaan
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	12	279,996,250	BPKAD	APBD	12	287,000,000	Sub Bidang Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan
		Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	500	189,494,409	BPKAD	APBD	500	194,237,500	Sub Bidang Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan
		Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	1	249,995,274	BPKAD	APBD	1	256,250,000	Sub Bidang Perbendaharaan PPKD dan Dana Transfer pada Bidang Perbendaharaan
		Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	12	299,992,485	BPKAD	APBD	12	307,500,000	Sub Bidang Perbendaharaan PPKD dan Dana Transfer pada Bidang Perbendaharaan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET TAHUN 2024				PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
						VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	7	249,992,354	BPKAD	APBD	7	256,250,000	Kelompok Jabatan Fungsional
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	2	60,000,284	BPKAD	APBD	2	61,500,000	Sub Bidang Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan
		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	1	64,989,580	BPKAD	APBD	1	66,625,000	Sub Bidang Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan

IV-12

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET TAHUN 2024				PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
						VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	1	199,963,381	BPKAD	APBD	1	205,000,000	Kelompok Jabatan Fungsional
		Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1	59,993,269	BPKAD	APBD	1	61,500,000	Sub Bidang Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan
		Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	72	149,995,465	BPKAD	APBD	72	153,750,000	Sub Bidang Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET TAHUN 2024				PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
						VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Laporan Keuangan Daerah Memenuhi Standar	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi standar	%	100	1,374,588,622			100	1,470,969,026	Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi
		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	1	224,999,862	BPKAD	APBD	1	251,125,000	Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi
		Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	19	341,998,802	BPKAD	APBD	19	392,057,537	Kelompok Jabatan Fungsional
		Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	1	99,999,762	BPKAD	APBD	1	102,500,000	Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	199,999,830	BPKAD	APBD	2	205,000,000	Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET TAHUN 2024				PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
						VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	102,165,930	BPKAD	APBD	1	104,720,335	Kelompok Jabatan Fungsional
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	12	80,430,092	BPKAD	APBD	12	82,441,154	Kelompok Jabatan Fungsional
		Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen Raperbup	1	174,999,834	BPKAD	APBD	1	179,375,000	Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi
		Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	72	149,994,510	BPKAD	APBD	72	153,750,000	Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET TAHUN 2024				PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
						VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Pengelolaan Dana Transfer dan Bantuan Keuangan Memenuhi Standar	Persentase penerbitan SP2D Bantuan Keuangan yang tepat waktu	%	100	831,558,556,373			100	1,638,982,372,022	Bidang Anggaran dan Bidang Perbendaharaan
		Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan	1	49,888,191	BPKAD	APBD	1	51,250,000	Sub Bidang Anggaran PPKD pada Bidang Anggaran
		Sub Kegiatan Analisa Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	1	570,644,096,000	BPKAD	APBD	1	1,342,125,566,251	Sub Bidang Perbendaharaan PPKD dan Dana Transfer pada Bidang Perbendaharaan
		Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	30,000,000,000	BPKAD	APBD	1	60,442,369,284	Sub Bidang Perbendaharaan PPKD dan Dana Transfer pada Bidang Perbendaharaan
		Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	1	230,864,572,182	BPKAD	APBD	1	236,363,186,487	Sub Bidang Perbendaharaan PPKD dan Dana Transfer pada Bidang Perbendaharaan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET TAHUN 2024				PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
						VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah		Meningkatnya kualitas data dan informasi	Persentase data dan informasi yang akurat dan mutakhir	%	100	626,446,899			100	642,111,250	Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi
	Lingkup Keuangan Daerah	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1	49,999,743	BPKAD	APBD	1	51,250,000	Sub Bidang Teknologi Informasi pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi
		Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan	Dokumen	1	210,499,805	BPKAD	APBD	1	215,762,500	Sub Bidang Teknologi Informasi pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi
		Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	72	365,947,351	BPKAD	APBD	72	375,098,750	Sub Bidang Teknologi Informasi pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET TAHUN 2024				PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
						VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik	%	90	1,909,974,652			91	2,057,175,000	Kabid Aset Daerah
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Perencanaan, Penatausahaan, dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Memenuhi Standar	Persentase Barang Milik Daerah yang Penatausahaanya tepat waktu	%	90	1,909,974,652			91	2,057,175,000	Kabid Aset Daerah
		Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen Rancangan Perbup	2	240,000,000	BPKAD	APBD	2	251,125,000	Sub Bidang Perencanaan pada Bidang Aset Daerah
		Sub Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	110,000,000	BPKAD	APBD	2	112,750,000	Sub Bidang Perencanaan pada Bidang Aset Daerah
		Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	174,994,899	BPKAD	APBD	2	205,000,000	Sub Bidang Perencanaan pada Bidang Aset Daerah
		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	159,993,630	BPKAD	APBD	1	164,000,000	Kelompok Jabatan Fungsional
		Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	1	99,997,224	BPKAD	APBD	1	102,500,000	Kelompok Jabatan Fungsional
		Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1	249,999,777	BPKAD	APBD	1	307,500,000	Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan pada Bidang Aset Daerah

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET TAHUN 2024				PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
						VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	2	200,000,000	BPKAD	APBD	2	205,000,000	Sub Bidang Perencanaan pada Bidang Aset Daerah
		Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	174,999,842	BPKAD	APBD	1	196,800,000	Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan pada Bidang Aset Daerah
		Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	500	149,999,898	BPKAD	APBD	150	153,750,000	Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan pada Bidang Aset Daerah
		Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	2	99,999,225	BPKAD	APBD	2	102,500,000	Sub Bidang Penatausahaan pada Bidang Aset Daerah
		Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	2	99,990,957	BPKAD	APBD	2	102,500,000	Sub Bidang Penatausahaan pada Bidang Aset Daerah
		Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	72	149,999,200	BPKAD	APBD	72	153,750,000	Sub Bidang Penatausahaan pada Bidang Aset Daerah

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET TAHUN 2024				PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
						VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Meningkatnya Tata Kelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Baik, Bersih, dan Efektif	Nilai SAKIP BPKAD	Kategori	BB	48,421,983,133			BB	47,994,789,576	Sekretaris
	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan	%	100	780,783,329			100	797,750,000	Sekretaris
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	199,998,058	BPKAD	APBD	9	205,000,000	Kelompok Jabatan Fungsional
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	49,996,831	BPKAD	APBD	1	51,250,000	Kelompok Jabatan Fungsional
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	49,999,837	BPKAD	APBD	1	51,250,000	Kelompok Jabatan Fungsional
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	29,994,260	BPKAD	APBD	1	30,750,000	Kelompok Jabatan Fungsional
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	30,005,640	BPKAD	APBD	1	30,750,000	Kelompok Jabatan Fungsional

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET TAHUN 2024				PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
						VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7	140,795,287	BPKAD	APBD	7	143,500,000	Kelompok Jabatan Fungsional
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	17	279,993,416	BPKAD	APBD	17	285,250,000	Kelompok Jabatan Fungsional
	Kegiatan Administrasi Keuangan		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan yang tepat waktu	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	%	100	39,467,076,535			100	40,803,830,214	Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	97	39,182,145,074	BPKAD	APBD	100	40,507,705,214	Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	59,996,513	BPKAD	APBD	1	61,500,000	Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	29,974,222	BPKAD	APBD	1	30,750,000	Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	29,990,924	BPKAD	APBD	2	30,750,000	Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET TAHUN 2024				PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
						VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	24	149,990,268	BPKAD	APBD	24	157,750,000	Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	14,979,534	BPKAD	APBD	2	15,375,000	Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah yang tertib lingkup BPKAD	Persentase aset yang tercatat lingkup BPKAD	%	100	49,962,297			100	51,250,000	Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	14,975,738	BPKAD	APBD	1	15,375,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
		Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	19,994,481	BPKAD	APBD	1	20,500,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	14,992,078	BPKAD	APBD	1	15,375,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET TAHUN 2024				PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
						VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian, Umum dan Kehumasan	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	%	100	353,904,614			100	363,875,000	Sekretariat
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	149,941,575	BPKAD	APBD	3	153,750,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
		Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	19,999,561	BPKAD	APBD	1	20,500,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	19,998,454	BPKAD	APBD	1	20,500,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
		Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	97	19,990,350	BPKAD	APBD	100	20,500,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	150	119,000,000	BPKAD	APBD	150	123,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	24,974,674	BPKAD	APBD	50	25,625,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET TAHUN 2024				PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
						VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkup BPKAD	Persentase unit kerja lingkup BPKAD yang terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarananya	%	100	2,784,788,670			100	956,038,000	Sekretariat
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Roda 4 dan Roda 2)	Unit	9	2,606,089,170	BPKAD	APBD	9	774,900,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1	99,949,500	BPKAD	APBD	1	103,381,500	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	78,750,000	BPKAD	APBD	5	77,756,500	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET TAHUN 2024				PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
						VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya kualitas pelayanan jasa penunjang lingkup BPKAD	Persentase unit kerja lingkup BPKAD yang terlayani jasa penunjang	%	100	2,461,184,260			100	2,470,634,812	Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	352,836,496	BPKAD	APBD	12	361,816,947	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	972,002,994	BPKAD	APBD	12	944,025,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	1,136,344,770	BPKAD	APBD	12	1,164,792,865	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana lingkup BPKAD	Persentase sarana dan prasarana lingkup BPKAD dalam kondisi baik	%	100	1,341,763,800			100	1,377,805,000	Sekretariat
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Kendaraan Roda 4)	Unit	9	149,000,000	BPKAD	APBD	9	153,750,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET TAHUN 2024				PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
						VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - Kendaraan Roda 2 - Kendaraan Roda 4	Unit	68	568,750,000	BPKAD	APBD	68	583,430,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeulair Yang Terpelihara	Unit	2	49,900,000	BPKAD	APBD	2	51,250,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Aplikasi	2	149,760,000	BPKAD	APBD	2	153,750,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	124,956,000	BPKAD	APBD	3	128,125,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	149,897,800	BPKAD	APBD	1	153,750,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	149,500,000	BPKAD	APBD	2	153,750,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
JUMLAH TOTAL								889,323,061,322			1,696,869,000,326	

BAB V
P E N U T U P

Demikian Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 disusun sebagai implementasi dari penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bogor yang mendukung Reformasi Birokrasi. Sebagai bagian dari perencanaan tahun 2024-2026, diharapkan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat menjadi pedoman dalam tahapan penganggaran hingga ditetapkannya APBD Kabupaten Bogor Tahun 2024. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga diharapkan dapat menjadi acuan pihak-pihak terkait dalam bersinergi mendukung pencapaian target kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Semoga bermanfaat.



Plt. BUPATI BOGOR,

IWAN SETIAWAN